PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR: 00225/PER-Ump/08
TANGGAL : 18-04-08

ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKANPOTENSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

OLEH

NAMA : ROLLIES ANTONI

NIM : 22 2002 201

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008

ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKANPOTENSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

NAMA : ROLLIES ANTONI

NIM : 22 2002 201

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008

Halaman Pernyataan Bebas Plagiat

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rollies Antoni
Nim : 22 2002 201
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.
Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Febuari 2008

Rollies Antoni

Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah

Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	**: ANALISIS BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN POTENSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Nama	**: ROLLIES ANTONI**
NIM	**: 22 2002 201**
Fakultas	**: Ekonomi**
Jurusan	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Akuntansi Pemerintah**

Diterima dan Disyahkan

Pada tanggal, ...

Pembimbing,

(M. Orba Kurnawan, S.E, S.H)

Mengatahui

Dekan

U .b Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Sunardi, SE. M.Si)

MOTTO :

- *Kemauan Keras adalah salah satu langkah menuju keberhasilan dan tiada kata gagal dalam hidup ini selain keberhasilan yang tertunda*
- *Tanpa kesungguhan hati semua yang kita lakukan sia-sia*

(Penulis)

Kupersembahkan Untuk :

- *Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- *Adik-adikku*
- *Seseorang yang kusayangi*
- *Teman-teman Angkatan2002*
- *Almamaterku*

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Alhamdulillahirabbil A'lamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "(analisis bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan potensi daerah pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan)". Selain itu, penulis ucapkan terima kasih kepada orang tuaku yang kusayangi yang telah mendungkung secara moral dan materil, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada bapak M. Orba Kurniawan, SE. SH yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H.M. Idris, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Irfan Tarmizi, SE., Ak., MBA, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Aprianto, SE, selaku pembimbing akdemik

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen dan Staf serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak H. Marwan Sobrie, SE. MM selaku Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Bapak Rusdi dan Bapak Susanto yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat seperjuangan : Nita SE, Mail SE, Kodar SE, David SE, Erika SE, Deni SE, Anda SE, Nopriyan SE, Insan SE, Topik SE.
10. Adik-adikku : Derry, Verry, Iin, Venty, Rikky, Andrie
11. Kekasihku tersayang Rika Rahim yang telah memberikan dukungan semangat dan doa
12. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Akuntansi UMP angkatan 2002, dan team bola kaki Perseca

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang telah dilakukan mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Palembang, Februari 2008
Penulis

(Rollies Antoni)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER.....i
HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..... ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
HALAMAN PRAKATA..... v
HALAMAN DAFTAR ISI viii
HALAMAN DAFTAR TABEL..... x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... xi
ABSTRAK..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Perumusan Masalah.....6
C. Tujuan Penelitian.....6
D. Manfaat Penelitian.....7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....8
B. Landasan Teori.....9
1. Pajak Kendaraan Bermotor.....9
2. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah 11
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 13
4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBNKB...17
5. Perhitungan Bagi Hasil PKB dan BBNKB.....18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....20
B. Tempat Penelitian.....20

C. Operasionalisasi Variabel.....20
D. Data yang Diperlukan.....21
E. Teknik Pengumpulan Data.....22
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 25
1. Gambaran Singkat DISPENDA SUM-SEL.....25
B. Pembahasan.....40
1. Analisis Bagi Hasil PKB 2005 40
2. Analisis Bagi Hasil PKB 2006.....48
3. Analisis Bagi Hasil BBNKB 2005.....55
4. Analisis Bagi Hasil Hasil BBNKB 2006.....62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....71
B. Saran.....72

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel I.1 Potensi Daerah Sumatera Selatan.....3

Tabel I.2 Data Realisasi Pembagian PKB & BBNKB 2005-2006.....5

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel Daerah Sumatera.....21

Tabel IV.1 Realisasi Penerimaan PKB & BBNKB 2005-2006.....37

Tabel IV.2 Realisasi Penerimaan Kabupaten/Kota.....37

Tabel IV.3 Potensi Daerah Sumatera Selatan 38

Tabel IV.4 Pembagian PKB Berdasarkan Luas Wilayah 2005.....43

Tabel IV.5 Pembagian PKB Berdasarkan Jumlah Penduduk 2005.....45

Tabel IV.6 Pembagian PKB Berdasarkan Jumlah Kendaraan 2005 46

Tabel IV.7 Rekapitulasi Pembagian PKB Tahun 2005.....47

Tabel IV.8 Pembagian PKB Berdasarkan Luas Wilayah 2006.....50

Tabel IV.9 Pembagian PKB Berdasarkan Jumlah Penduduk 2006.....52

Tabel IV.10 Pembagian PKB Berdasarkan Jumlah Kendaraan 2006.....53

Tabel IV.11 Rekapitulasi Pembagian PKB Tahun 2006.....54

Tabel IV.12 Pembagian BBNKB Berdasarkan Luas Wilayah 2005.....57

Tabel IV.13 Pembagian BBNKB Berdasarkan Jumlah Penduduk 2005.....59

Tabel IV.14 Pembagian BBNKB Berdasarkan Jumlah Kendaraan 2005.....60

Tabel IV.15 Rekapitulasi Pembagian BBNKB Tahun 2006.....61

Tabel IV.16 Pembagian BBNKB Berdasarkan Luas Wilayah 2006.....64

Tabel IV.17 Pembagian BBNKB Berdasarkan Jumlah Penduduk 2006.....66

Tabel IV.18 Pembagian BBNKB Berdasarkan Jumlah Kendaraan 2006.....68

Tabel IV.19 Rekapitulasi Pembagian BBNKB Tahun 2006.....69

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi.....**
2. **Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....**
3. **Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian.....**
4. **Surat Riset.....**
5. **Surat Selesai Riset.....**
6. **Sertifikat Ngaji.....**
7. **Biodata Penulis.....**

ABSTRAK

Rolies Antoni / 22 2002 201/ Analisis Bagi Hasil Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Potensi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perhitungan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Potensi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan potensi daerah. Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai masukan mengenai pembagian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Jenis penelitian ini bila dilihat dari segi data analisis penelitian berdasarkan analisis dan jenis data, adalah analisis dan jenis data kualitatif dan kuantitatif yaitu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik analisis adalah Teknik Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan angka dan uraian penjelasan mengenai Pembagian Hasil PKB dan BBNKB untuk Kota/kabupaten se Sumatera Selatan.

Hasil analisis yang dilakukan maka dari analisis tersebut bahwa potensi luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang ada di Sumsel sangat besar, sehingga hal tersebut menjadi patokan pemerintah untuk menetapkan pembagian PKB dan BBNKB. Berdasarkan perhitungan penulis PKB tahun 2005 sebesar Rp. 151.287.106.734. sedangkan tahun 2006 menurut penulis sebesar Rp. 181.663.431.564. sedangka BBNKB pada tahun 2005 sebesar Rp. 205.904.583.840 dan pada tahun 2006 sebesar Rp. 212.320.653.588.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan sarana transportasi tidak terlepas dari kewajiban para pengguna transportasi untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pemungutan pajak, terutama pajak daerah dapat menambah pendapatan asli daerah serta membiayai pengeluaran daerah sehingga dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang baik dan nyaman bagi para pengguna sarana transportasi.

Menurut Ismail (2002:2). Pendapatan asli daerah dapat di pandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
   a. Pajak daerah
   b. Retribusi daerah
   c. Hasil pengelolaan kekayaan, pembagian laba dari BUMD dan BUMN
   d. Kekayaan lainnya
   e. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Salah satu pendapatan asli daerah lainnya yang sah yaitu pembagian hasil pajak merupakan pandapatan daerah yang harus disetor ke kas provinsi yang penerimaannya sebagian diperuntukkan bagi daerah. Untuk memperoleh penerimaan bagi hasil pajak, pemerintah menarik sejumlah pajak atas penggunaan fasilitas-fasilitas yang diterima, maka diperlukan suatu sistem atau formula untuk menentukan besarnya penerimaan pajak, agar dapat diketahui sejumlah pendapatan daerah yang jelas.

Menurut Mardiasmo (2002:14) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah di bagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Pajak provinsi meliputi : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraaan bermotor, bea balik nama kendaraan.
2. Pajak kabupaten atau kota, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pasal 2A ayat 1 yang mengatur hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan diantarannya hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota masing-masing paling sedikit 30%. Pembagian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan bahwa potensi tiap kabupaten/kota itu tidak sama.

Pembagian hasil pajak kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212 Tahun 2002, menurut Keputusan Gubernur Sumsel BAB X pasal 15 "pembagian untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Keputusan ini setelah dijadikan 100% (seratus persen) adalah sebagai berikut :

a. 40 % dibagi rata untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi

b. 60 % dibagi berdasarkan potensi Kabupaten/Kota masing-masing

Berikut ini merupakan salah satu potensi daerah Pemerintah Sumatera Selatan yang terangkum dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan tahun 2005 sampai tahun 2006.

Tabel I.1
Potensi Luas Wilayah. Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2006

Kota/Kab	2005			2006		
	Luas wilayah (Ha)	Jmlh Penduduk	Jlh Kendaraan	Luas wilayah (ha)	Jmlh Penduduk	Jlh. Kendaraan
Palembang	37.403	1.338.793	300.401	37.403	1.369.239	362.727
Muba	1.447.700	469.175	42.980	1.447.700	484.245	57.216
Banyuasin	1.214.274	733.828	15.004	1.214.274	757.398	25.499
OKI	1.690.532	656.828	35.603	1.717.817	672.192	48.190
OI	266.609	356.983	3.258	239.324	365.333	9.653
OKU	291.760	255.246	51.852	370.192	259.292	64.563
Oku Selatan	540.301	317.277	1.606	457.033	322.307	19.000
Oku Timur	335.604	556.100	5.751	340.440	564.824	4.561
Muara Enim	858.794	632.222	60.927	858.794	643.924	79.046
Prabumulih	42.162	130.340	17017	42.162	132.752	24.706
Lahat	663.250	545.754	22171	663.250	550.478	31.552
Pagaralam	57.916	114.562	3.385	57.916	115.553	5.324
Musi Rawas	1.213.457	474.430	38.2873	1.213.457	484.281	49.1093
Lbk Lggu	41.980	174.452	17.798	41.980	178.074	25.759
Jumlah	8.701.742	6.755.900	616.400	8.701.742	6.899.892	806.905

Sumber : Data BPS dan Dispenda Provinsi Sumatera Selatan, 2007

Potensi adalah suatu sumber baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang ada maupun yang belum ada akan tetapi belum bisa dikelola secara maksimal. Provinsi sumatera selatan memiliki salah satu potensi yaitu luas wilayah yang cukup luas yaitu seluas 8.701.742 meter persegi jumlah penduduk yang besar, sehingga masih banyak yang bisa di *eksploitasi* dari potensi tersebut baik itu luas wilayah maupun jumlah penduduk. Palembang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah yang kecil akan tetapi jumlah penduduk terbesar, sehingga potensi yang bisa *eksploitasi* adalah jumah penduduk yang rata-rata memiliki kendaraan dalam menunjang aktivitasnya. Dengan jumlah kendaraan yang cukup tinggi penggunanya akan tetapi berdasarkan persentase antara jumlah penduduk Sumsel dengan Jumlah kendaraan pada tahun 2005 hanya sebesar 9.12% dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Sumatera Selatan dan pada tahun 2006 sebesar 11.7% dibandingkan dengan jumlah penduduk atau dalam artian mengalami kenaikan sebesar 2.58% dan diharapkan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan dengan *estimasi* pertahun mengalami peningkatan sebesar 5% pertahun.

Berikut ini merupakan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan realisasai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tercatat di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005 sampai tahun 2006.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan BBNKB Dispenda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 dan 2006

Tahun		Anggaran	Realisasi	%
2005	PKB	Rp. 165.384.306.905	Rp. 176.943.984.518	106%
	BBNKB	Rp. 213.277.960.000	Rp. 240.824.074.666	112%
2006	PKB	Rp. 197.064.000.000	Rp. 212.471.393.641	107,82%
	BBNKB	Rp. 246.269.794.000	Rp. 248.328.249.811	100,84%

Sumber : Dispenda Sumsel,2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama dua tahun (2005-2006) yaitu pada tahun 2005 jumlah kendaraan yang meningkat sebanyak 616.400 unit hal tersebut diiringi dengan peningkatan realisasi bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp. 176.943.984.518 dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 165.384.306.905 angka tersebut melebihi anggaran sebesar Rp. 11.559.677.553 atau berdasarkan persentase sebesar 106%, sedangkan untuk realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 240.824.074.666 lebih besar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 213.277.960.000 atau sebesar 112%, pada tahun 2006 jumlah kendaraan yang naik cukup signifikan sebanyak 805.905 unit dan hal tersebut diiringi dengan peningkatan realisasi bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Selatan adalah Rp. 214.159.032.437 berdasarkan anggaran yang ditetapkan pada tahun 2006 sebesar Rp. 197.064.000.000 dengan selisih lebih sebesar Rp. 15.407.393.641 atau berdasarkan persentase sebesar 107,82%, dan untuk penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 248.328.249.811 alebih besar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 246.269.794.000 mengalami kelebihan sebesar Rp. 2.058.455.811 atau berdasarkan persentase sebesar 100,84%. Hal ini menunjukkan bahwa

anggaran yang ditargetkan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan tercapainya realisasi yang melebihi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, maka pada sistem bagi hasil kepada pemerintah kota atau kabupaten dapat menguntungkan pihak kota atau kabupaten dengan potensi yang ada di daerah seperti daerah yang memiliki kontribusi yang besar atau daerah yang mempunyai potensi baik itu jumlah kendaraan, luas wilayah maupun jumlah penduduknya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagi hasil pajak dari penerimaan pajak Provinsi Sumatera Selatan dengan mengambil judul : " **Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Potensi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai uraian sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perhitungan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Potensi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan potensi daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2 Bagi Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah terutama pembagian hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

3. Bagi Almanater

   Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan literatur untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pembagian PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dadang wahyudi (2005) yang berjudul "Peranan BBNKB terhadap PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan". perumusan masalahnya yaitu bagaimana peranan BBNKB terhadap PAD pada Dinas Pendapatan Daerah tingkat I. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi besarnya BBBNKB terhadap PAD dan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan penerimaan PAD. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode analisisnya deskriptif.

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan judul "Analisis Penerimaan bagi hasil pajak kendaraan bermotor berdasarkan potensi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan". Perumusan masalahnya yaitu bagaimana perhitungan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang benar sehingga penerimaan daerah dapat meningkat. Terdapat persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu : terdapat penjelasan salah satu unsur bagi hasil pajak sebagai pendapatan lain-lain yang sah yang berasal dari pajak daerah provinsi serta membahas variable yang sama yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Sedang perbedaannya yaitu penulis membahas perhitungan penerimaan bagi hasil pajak sebagai penerimaan PAD.

B. Landasan Teori

1. Pajak Kendaraan Bermotor

1) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1, pengertian pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan dari semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Menurut Marihot (2006:137) Pengertian Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. Sendangkan pengertian kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang bergerak oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

2) Objek dan subjek PKB

Objek pajak PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk dalam objek pajak PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan

rekreasi. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan.

Dan yang bukan objek pajak PKB adalah kepemilikan atas penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kepemilikan oleh konsulat, kedutaan perwakilan asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik dan kepemilikan atas atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang di atur dalam peraturan daerah.

Subjek pajak pada PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewjiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajakdapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PKB

a) Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Marihot (2006:142) Dasar pengenaan pajak PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam table nilai jual kendaraan yang berlaku.
2) Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut :

1) Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satuan daya.
2) Penggunaan kendaraan bermotor.
3) Jenis kendaraan bermotor.
4) Merek kendaraan bermotor.
5) Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
6) Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
7) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Walaupun demikian, faktor-faktor di atas tidak harus semuanya digunakan dalam menghitung NJKB. Faktor di atas disesuaikan dengan kondisi daerah yang memberlakukan PKB tersebut.

Menurut Marihot (2006:143) bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor di bawah ini :

1) Tekanan kadar, yang dibedakan atas jumlah sumbu atau as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.
3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak , dan cirri-ciri mesin yang 1.000 cc atau 2.000 cc.

b) Tarif PKB

Tarif PKB berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Pasal 5 Tarif PKB dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar :

1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

c) Perhitungan PKB

Menurut Marihot (2006:145) besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X (NJKB x Bobot)

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1) Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut UU no. 34 Tahun 2000, pengertian bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukkannnya kedalam badan usaha.

Menurut Marihot (2006:167), penyerahan Kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah (termasuk hibah wasiat dan hadiah), warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pengenaan BBNKB tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang akan menjadi landasan hukum opersional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan BBNKB di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah BBNKB ditetapkan dala satu peraturan daerah atau ditetapkan dala dua peraturan daerah yang terpisah.

Penerapan BBNKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan BBNKB di Provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang BBNKB sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BBNKB pada provinsi dimaksud.

Menurut Ismail (2004:154) pemungutan BBNKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan BBNKB pada suatu provinsi adalah sebagaimana di bawah ini :

a) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang no 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

c) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang BBNKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk BBNKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang BBNKB dan Peraturan Daerah tentang BBNKAA.

d) Keputusan Gubernur yang mengatur BBNKB sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BBNKB pada provinsi dimaksud. Sebagaimana halnya pada huruf C di atas, keputusan gubernur yang mengatur tentang BBNKB dapat dibuat menyatu, yatiu satu keputuan guberbur untuk BBNKB&KAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang BBNKB dan Keputusan Giubernur tentang BBNKAA.

2) Objek, Subjek dan Wajib Pajak BBNKB

Menurut Ismail (2004:160) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahaan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahaan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

a) Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan

b) Untuk diperdagangkan

c) Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia

d) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.

Yang bukan menjadi Objek adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada pihak-pihak di bawah ini :

a) Penyerahan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyerahan kendaraan bermotor kepada BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak BBNKB.

b) Penyerahan kendaraan bermotor kepada kedutaan. Konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

c) Penyerahan kendaraan bermotor kepada subjek pajak lainnya yang di atur dengan peraturan daerah.

Menurut Mariot (2006: 171) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jika wajib pajak pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada BBNKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undangdan peraturan daerah tentang BBNKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak

terutang. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan BBNKB

1) Dasar Pengenaan BBNKB

Dasar pengenaan pajak BBNKB adlaah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan pajak kendaraan bermotor. NJKB sebagaimana dimaksud di sini adalah nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tabel perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. NJKB ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur menetapkan NJKB dengan Keputusan gubernur, yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

2) Tarif BBNKB

Menurut Marihot (2006:172) tariff BBNKB berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang brarti kendaraan baru), penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas), dan penyerahan karena warisan. Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor bukan umum, kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pasal 17 menentukan tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :

a) 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum

b) 10% untuk kendaraan bermotor umum

c) 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :

a) 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum

b) 1% untuk kendaraan bermotor umum

c) 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif BBNKB atas penyerahankarena warisan ditetapkan sebesar :

a) 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum

b) 0,1% untuk kendaraan bermotor umum

c) 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Besarnya pokok BBNKB yang terutang dihitungn dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan BBNKB adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan Bermotor

5. Perhitungan Bagi Hasil PKB dan BBNKB

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:161) Hasil Penerimaan pajak merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah yang sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota diwilayah provinsi

tempat pemungutannya. Pembagian hasil penerimaan PKB dan BBNKB ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, dengan pembagiannya adalah :

a. Paling banyak 70% menjadi bagian pemerintah provinsi

b. Paling banyak 30% menjadi bagian pemerintah kabupaten atau kota

Bagian pemerintah kabupaten atau kota di Sumatera Selatan untuk bagi hasil pajak PKB dan BBNKB ditetapkan 30% setelah dikurangi 5% untuk biaya pemungutan yang terdiri dari :

a) 40% dibagi rata tiap kabupaten dan kotanya

b) 60% dibagi berdasarkan potensi atau dilihat dari realisasi PKB dan BBNKB yang dicapai tiap kabupaten atau kotanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiono (2004 : 13) adalah berdasarkan analisis dan jenis data yang terdiri dari :

1) Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, dan gambar.
2) Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka

penelitian ini adalah jenis penelitian berdasarkan analisis dan jenis data, adalah analisis dan jenis data kualitatif dan kuantitatif yaitu penelitian dengan menganalisis data yang diperoleh dari objek penelitian dan dinyatakan dalam bentuk kata, angka atau kalimat yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan POM IX Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel tersebut diukur. Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
1. Potensi Daerah	Suatu sumber baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang ada maupun yang belum ada akan tetapi belum bisa dikelola secara maksimal	a) Jumlah Penduduk b) Luas Wilayah c) Jumlah Kendaraan
2. Perhitungan bagi hasil PKB dan BBNKB	Hasil Penerimaan pajak merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah yang sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota diwilayah provinsi tempat pemungutannya. Pembagian hasil penerimaan PKB dan BBNKB ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, dengan pembagiannya	a) Realisasi penerimaan provinsi(70%) b) Realisasi penerimaan kabupaten/kota (30%) - (40% bagi rata) - (60% potensi daerah)

Sumber : Penulis

D. Data yang diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146-147) data terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yang terdiri dari :

1. Sejarah Singkat Dispenda Provinsi Sumatera Selatan
2. Struktur organisasi dan pembagian tugas DISPENDA Provinsi
3. Data anggaran dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Tahun Anggaran 2005 - 2006 Provinsi Sumatera Selatan.
4. Data Bagi Hasil PKB dan BBNKB Provinsi Sumatera Selatan 2005-2006
5. Data jenis kendaraan, jumlah penduduk dan luas wilayah tahun 2005 - 2006

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut W. Gulo (2002:115) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

1) Pengamatan langsung (observasi)

   Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaborartornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka selama penelitian.

2) Survei

   Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3) Wawancara

   Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan respoden.

4) Kuisioner

Kuisioner atau angket hanya berbeda dalam bentuknya. Pada kuisioner, pertanyaan disusun dalam bentuk Tanya, sedangkan pada angket pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

5) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara yaitu dengan menanyakan langsung dengan pihak yang berkepentingan atau pihak Dispenda dan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan penelusuran data yang tersedia. Peneliti melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang berwenang mengenai data-data yang berkaitan dengan penelian ini

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:124) ada dua metode yang digunakan dalam melakukan analisis data yaitu:

a. Metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang tidak di ukur dalam suatu skala numerik (angka).

b. Metode analisis kuantitatif yaitu metode analisis data yang di ukur dalam suatu skala numerik (angka).

4 (750.000)

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan pengelolaan penerimaan bagi hasil pajak PKB dan BBNKB di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan serta upaya-upaya untuk meningkatkan PAD.

2. Teknik Analisis

Teknik Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan angka dan uraian penjelasan mengenai Pembagian Hasil PKB dan BBNKB untuk Kota/kabupaten se Sumatera Selatan

Rumus : realisasi penerimaan PKB dan BBKNB dikurangi biaya pemungutan sebesar 5% menghasilkan penerimaan netto, kemudian dibagi menjadi dimana 70% provinsi dan 30% kota/kabupaten. 30% pembagian kota/kabupaten dibagi dua dimana 40% dibagai rata dan 60% berdasarkan potensi daerah.

4 (3.000 = 750)

4 (8.500 = 85)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

a) Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dinas pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan berlokasi di jalan POM IX Palembang, wilayah yang tercakupi di Dinas pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan yaitu terdiri dari kota Palembang, MUBA, Banyuasin, OKI, OI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, OKU, OKU Timur, Oku Selatan, Musi Rawas dan Lubuk Linggau.

Pada tahun 1977 urusan pajak dan retribusi daerah pada seluruh tingkat I dan Daerah tingkat II merupakan bagian dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah masing-masing. Agar lebih teratur pelaksanaan urusan pajak dan retribusi daerah, maka dikeluarkan peraturan daerah yang merupakan landasan pembentukan dinas pendapatan daerah di daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah No. 2 Tahun 2001 secara umum ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.

c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

e. Melakukan penyuluhan mengenai pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

f. Melakukan urusan tata usaha.

g. Pelaksanaan teknik organisasi

2. Struktur Organisasi DISPENDA SUMSEL

Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan berbentuk lini atau garis, struktur organisasi menunjukkan wewenang dan tanggung jawab secara formal dalam setiap fungsi organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Darah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang wakil kepala Dinas. Di dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas membawahi lima sub. Dinas ini adalah merupakan cabang dinas atau sub bagian, melainkan sebagian dari unit bagian yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah SumSel. Sub dinas ini merupakan sub bagian yang disebut seksi-seksi.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
DISPENDA SUMSEL

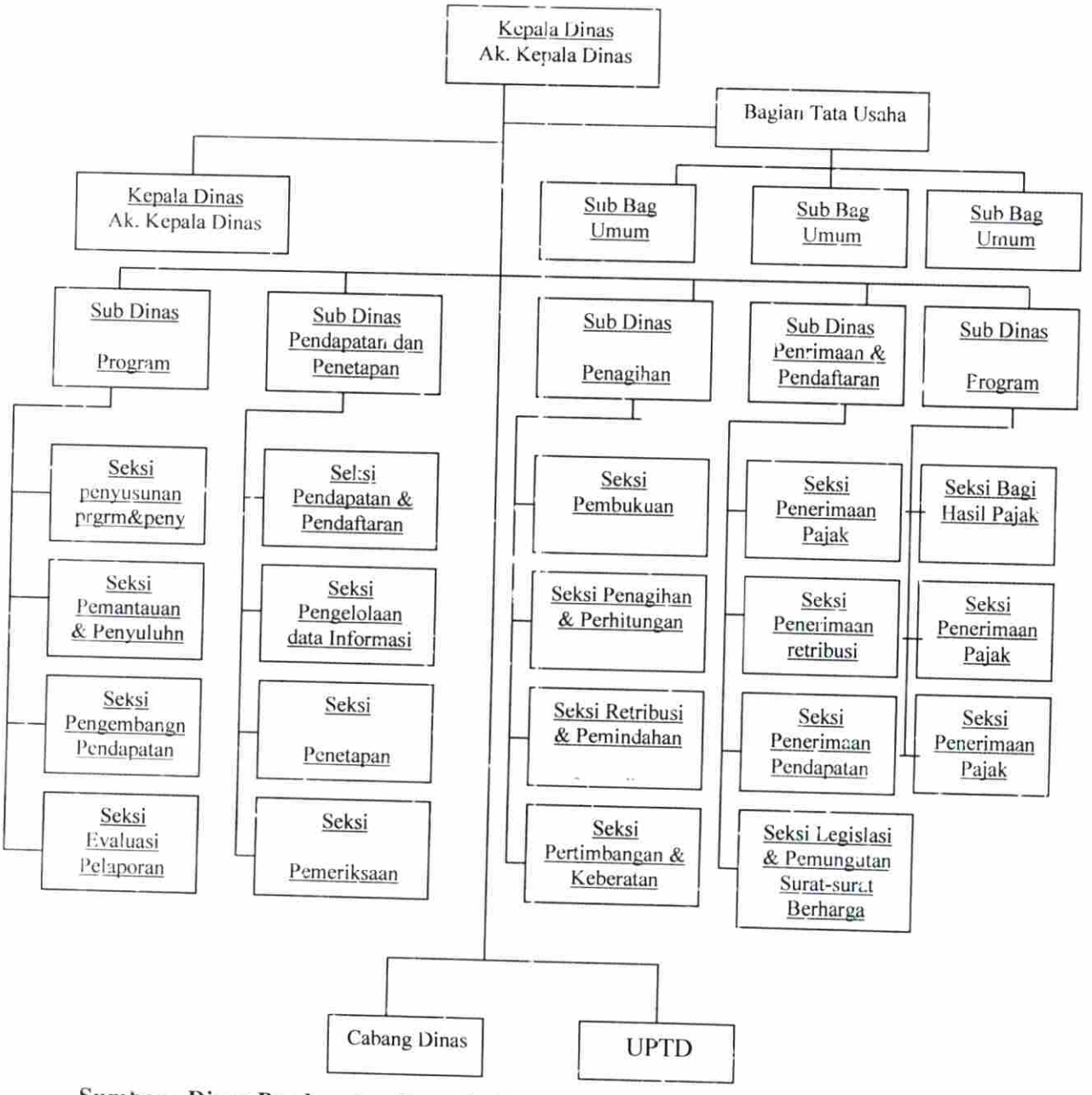

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2007

a. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2001, dijelaskan juga mengenai uraian tugas dan fungsi aparat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

a) Membantu Gubernur sebagai kepala daerah dalam bidang tugasnya.

b) Memimpin kegiatan-kegiatan sub bagian usaha, seksi-seksi, unit pelaksana, teknis dinas, urusan-urusan, sub seksi-seksi dan unit penyuluhan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya.

c) Merumusakan kebijakan operasional dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah serta kebijaksanaannya untuk pendapatan daerah lainnya.

d) Merumuskan aktivitas unit organisasi bawahannya kea rah tujuan atau target yang akan dicatat sesuai dengan rencana dan program.

e) Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kerja yang telah digariskan.

f) Mengawasi dan menilai unti organisasi bawahannya dalam melaksanakan program kerja yang telan digariskan.

g) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Gubernur sebagai kepala daerah.

h) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Gubernur sebagai kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan dalam bidang tugasnya.

2) Tugas Wakil Kepala Dinas

Mengkoordinir urusan perencanaan, pembinaan, kepegawaian, keuangan yang diperlukan dalam bidang tugasnya.

3) Tugas Bagian Tata Usaha

Pelaksanaan tugas kepala Dinas dalam urusan kepegawaian keuangan, perlengkapan dan urusan umum di Bantu oleh bagian Tata Usaha, bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya
b) Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan
c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-menyurat, kearsipan dan pengadaan.

4) Tugas Sub Dinas Program

Pelaksanaan tugas bagian tata usaha dibantu oleh sub bagian, sub bagian yang berada di bawahnya, yaitu :

a) Tugas Sub Bagian Umum

Mengurus surat-menyurat, mengelola arsip dan rumah tangga

b) Tugas Sub Bagian Kepegawaian

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.
2) Memutasi pegawai dan mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Tugas Sub Bagian Keuangan

Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, kegiatannya berupa penyusunan anggaran belanja dinas serta pembukuan kas.

d) Tugas Sub Bagian Program

Pelaksanaan tugas kepala dinas dalam menyusun program di bidang pendapatan dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi, dibantu oleh sub dinas program.

Ruang lingkup tugas tersebut sejalan dengan fungsinya yaitu :

1) Penyusunan rencana dan program kerja
2) Pematauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan daerah
4) Pengkajian evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan tugas sub dinas program dibagi ke dalam beberapa seksi dengan tugas yang berbeda-beda. Seksi tersebut terdiri dari :

1) Tugas seksi penyusunan program dan penyuluhan

   Menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

2) Tugas Seksi Pematauan dan pengendalian

   Melaksanakan pemantauan dan pengedalian yang berhubungan dengan penerimaan dan penetapan daerah.

3) Tugas Seksi Pengembangan dan Pendapatan

Melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

4) Tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

5) Tugas Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Selain sub dinas program dan bagian tata usaha, kepala dinas juga di Bantu oleh sub dinas pendataan dan penetapan. Sub dinas pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan serta pemeriksaan. Untuk meyelenggarakan tugas tersebut. Sub dinas pendataan dan penetapan mempunyai fungsi tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak
b) Melakukan pengelolaan data dan informasi
c) Melaksanakan penatausahaan dan penetapan berkas wajib pajak
d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak

Kelancaran tugas akan tercapai diantaranya melalui pembagian kerja, oleh karena itu sub dinas pendataan dan penetapan dibagi dalam beberapa seksi, yaitu :

1) Tugas Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Melakukan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.

2) Tugas Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengelolaan data yang meliputi objek dan subjek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi serta pemungutan daerah lainnya.

3) Tugas Seksi Penetapan

Melakukan usaha penetapan pajak, penertiban seurat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

4) Tugas Seksi Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan, penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi dan lapangan.

6) Tugas Sub Dinas Penagihan

Secara lengkaptugas dari Sub dinas penagihan ini adalah melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahan buku serta perimbangan dan keberatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub dinas penagihaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan/penyetoran/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.

b) Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fiscal.

c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.

d) Retribusi, pemindah bukuan dan rekonsiliasi

7) **Tugas Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain**

Kepala dinas menyerahkan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lainserta legalitas pembukuan tugas surat-surat berharga kepada Sub dinas pendapatan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.

b) Mengumpulkan dan mengelola data bersumber-penerimaan lain-lain diluar pajak dan retribusi daerah.

c) Melakukan pencatatan dan penerimaan BUMD dan pendapatan lainnya.

d) Melaksanakan legalisasi atau surat ketetapan pajak retribusi.

Dalam melaksanakan tugasnya sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain dibagi menjadi beberapa seksi. Seksi-seksi tersebut adalah :

a) Tugas Seksi Penerimaan Pajak

Melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak

b) Tugas Seksi Penerimaan Retribusi

Melakukan penatausahaan penerimaan retribusi

c) Tugas Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain

Melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain diluar pajak dan retribusi daerah

d) Tugas Seksi Legalisasi dan pembukuan Surat-surat Berharga

Melaksanakan pengesahanatas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daeran serta menerima dan mencatat pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

8) Tugas Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub dinas terakhir yang membantu kepala dinas adalah sub dinas bagi hasil pendapatan. Sub dinas ini mempunyai tugas penatausahaan bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

Sub dinas pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Melaksanakan penerimaan bagi hasil pajak

b) Melaksanakan urusan administrasi

c) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak

d) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan Terdiri dari :

1. Tugas seksi bagi hasil pajak

   Melakukan administrasi erta cara perhitungan bagi hasil pajak

2. Tugas Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

   Melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak

3. Tugas seksi peraturan dan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

   Mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan pendapatan daerah serta melakuak pengkajian peningkatan pendapatan.

9) Tugas Cabang Dinas

Salah satu yang dibawahi oleh kepala dinas adalah cabang dinas. Unit ini merupakan unsure pelaksan teknis operasional dinas. Cabang dinas dipimpin oleh kepala cabang dinas yang berada dibawah tanggung jawab kepada kepala dinas mempunyai fungis tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan unsur teknis opersional
b. Melaksanakan cabang dinas terdiri dari :

   Susunan cabang dinas terdiri dari :

   1) Kepala cabang dinas
   2) Unsur staf
   3) Unsur lini
   4) Kelompok jabatan fungsional

   Kepala cabang dinas adalah orang yang bertugas kepala staf dalam pelaksanaan tugas opersional lapangan dan yang bertindak sebagai ketua. Unsur staf adalah pelaksana tugas administrasi di cabang dinas, sedangkan unsur lini adalah petugas teknis operasionalnya.

10) Tugas Pelaksana Teknis Dinas

Bagian yang bertugas sebagai pelaksana teknis opersional dinas adalah unit pelaksana teknis dinas ini bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas disatu atau beberapa wilayah kabupaten.kota. untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Unit pelaksana teknis dinas mempunyai fungis melaksanakan sebagai tugas dinas sesuai dengan bidanganya dan melaksanakan urusan adminsitrasi

11) Tugas Jabatan Kelompok Fungsional

Susunan organisasi dinas pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan yang terakhir adalah jabatan fungsional. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan atau kepala unit pelaksanaan teknik dinas yang bersangkutan. Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

b) Laporan Realisasi PKB dan BBNKB

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB) provinsi Sumatera Selatan, telah mencapai hasil maksimum yang telah tercapai dalam beberapa tahun ini di mana tiap tahun penerimaan yang dihasilkan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam penerimaan hasil PKB dan BBNKB pembagian yang

dibagikan kepada daerah dan kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan berdasarkan potensi yang ada di daerah dan kota yang mempunyai kontribusinya terhadap realisasi dan penerimaan PKB dan BBNKB.

Tabel IV.1
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan BBNKB Dispenda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 dan 2006

Tahun		Anggaran	Realisasi	%
2005	PKB	Rp. 165.384.306.905	Rp. 176.943.984.518	106%
	BBNKB	Rp. 213.277.960.000	Rp. 240.824.074.666	112%
2006	PKB	Rp. 197.064.000.000	Rp. 212.471.393.641	107,82%
	BBNKB	Rp. 246.269.794.000	Rp. 248.328.249.811	100,84%

Sumber : Dispenda Sumsel,2007

c) **Data Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sumatera Selatan**

Tabel IV.2
Realisasi Penerimaan PKB & BBNKB Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Kabupaten Kota	Realisasi PKB 2005	Realisasi BBNKB 2005	Realisasi PKB 2006	Realisasi BBNKB 2006
Palembang	21.387.569.621	23.207.379.682	24.764.286.605	21.594.776.110
Muba	2.368.301.389	3.905.608.360	2.995.208.841	4.617.290.785
Banyuasin	2.170.047.592	3.738.355.090	2.702.871.420	3.827.977.208
OKI	2.155.469.532	3.722.218.901	2.826.794.265	4.454.925.071
OI	1.775.080.228	2.772.602.497	2.205.807.291	2.351.627.083
OKU	2.429.006.705	3.393.879.567	2.990.574.834	4.092.431.718
Oku Selatan	1.658.219.775	2.710.225.868	1.976.093.126	2.489.661.369
Oku Timur	2.073.183.429	3.011.719.665	2.692.045.599	4.163.002.411
Muara Enim	3.535.713.297	5.744.376.419	4.117.263.312	5.847.869.639
Prabumulih	2.591.467.812	3.949.853.670	3.147.510.012	3.664.059.318
Lahat	2.226.986.346	3.144.920.121	2.684.739.234	3.009.539.160
Pagaralam	1.634.346.563	2.290.181.201	1.967.813.621	2.318.301.905
Musi Rawas	2.260.098.236	3.653.584.371	2.806.098.543	3.930.644.381
L. Linggau	2.478.270.167	3.450.376.983	2.979.355.295	3.029.289.065
Total	50.743.760.692	68.705.282.395	60.856.459.998	69.391.395.223

Sumber : Dispenda Sumsel, 2007

d) Data Potensi Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2006

Potensi daerah yang berkaitan dengan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB provinsi Sumatera Selatan, yaitu potensi luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang ada di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2005 sampai 2006. potensi yang ada di Sumsel sangat besar baik itu luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan dan pada tiap tahun khususnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan semakin meningkat, khususnya jumlah kendaraan yang ada di Sumsel sangat pesat meningkatnya khususnya di Kota Palembang.

Berikut ini penulis akan menyajikan data mengenai Potensi Daerah Sumatera Selatan.

Tabel IV.3
Potensi Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2006

	2005			2006		
Kota/Kab	Luas wilayah (Ha)	Jmlh Penduduk	Jlh Kendaraan	Luas wilayah (ha)	Jmlh Penduduk	Jlh. Kendaraan
Palembang	37.403	1.338.793	300.401	37.403	1.369.239	362.727
Muba	1.447.700	469.175	42.980	1.447.700	484.245	57.216
Banyuasin	1.214.274	733.828	15.004	1.214.274	757.398	25.499
OKI	1.690.532	656.828	35.603	1.717.817	672.192	48.190
OI	266.609	356.983	3.258	239.324	365.333	9.653
OKU	291.760	255.246	51.852	370.192	259.292	64.563
Oku Selatan	540.301	317.277	1.606	457.033	322.307	19.000
Oku Timur	335.604	556.100	5.751	340.440	564.824	4.561
Muara Enim	858.794	632.222	60.927	858.794	643.924	79.046
Prabumulih	42.162	130.340	17017	42.162	132.752	24.706
Lahat	663.250	545.754	22171	663.250	550.478	31.552
Pagaralam	57.916	114.562	3.385	57.916	115.553	5.324
Musi Rawas	1.213.457	474.430	38.2873	1.213.457	484.281	49.1093
Lbk Lggu	41.980	174.452	17.798	41.980	178.074	25.759
Jumlah	8.701.742	6.755.900	616.400	8.701.742	6.899.892	806.965

Sumber : Data BPS dan Dispenda Provinsi Sumatera Selatan, 2007

Pada tahun 2005 luas wilayah di Sumatera Selatan adalah sekitar 8.701.742 hektar yang terbagi kedalam 14 kota/kabupaten dimana daerah tang mempunyai luas wilayah yang besar adalah daerah kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan luas daerah 1.6901.532 atau hampir 20% dari keseluruhan wilayah daerah Sumatera Selatan dan daerah yang mempunyai daerah yang tidak luas adalah Kota Palembang dengan luas wilayah hanya sebesar 37.403 hektar atau hanya 0.43% dari keseluruhan luas wilayah Sumatera Selatan dan pada tahun 2006 Kabupaten OKI mengalami perluasan wilayah sebesar 1.717.817 dimana hal tersebut dikarenakan pengembalian wilayah yang dimekarkan dari kabupaten Ogan Ilir (OI) dan untuk daerah yang mempunyai luas wilayah yang kesil adalah Kota Palembang. Sedangkan untuk jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2005 sebanyak 6.755.900 dan daerah yang mempunyai jumlah penduduk yang besar adalah Kota Palembang yaitu sebesar. 1.338.793 atau sebesar 19.81% dan daerah yang mempunyai jumlah penduduk terkecil adalah kota Pagaralam dengan jumlah penduduk sebesar 114.562 pada tahun 2006 Kota Palembang mempunyai penduduk sebanyak 1.369.239 dan pagar alam sebesar 115.553. Sedangkan untuk jumlah kendaraan Kota palembang mendominasi jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 300.401 dari 616.400 pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 sebanyak 362.727 dari total keseluruhan 806.905 unit kendaraan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB) provinsi Sumatera Selatan yang terjadi pada tahun 2005-2006, telah mencapai hasil maksimum yang telah tercapai dalam beberapa tahun ini di mana tiap tahun penerimaan yang dihasilkan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB) telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2005 realisasi penerimaan PKB sebesar Rp. 176.943.984.518 dan BBNKB sebesar Rp. 240.824.074.666 dan pada tahun 2006 realisasi penerimaan PKB sebesar Rp. 212.471.393.641dan BBNKB sebesar Rp. 248.328.249.811.

Dalam bab IV ini penulis akan melakukan analisis mengenai realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang akan di bagi berdasarkan potensi daerah yang telah penulis jelaskan. Berikut ini adalah analisis realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang akan dibagikan kepada daerah-daerah dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

1. Analisis Pembagian Penerimaan Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2005 dan 2006

a. Tahun 2005

Pada tahun 2005 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan pendapatan dari sektor PKB sebesar Rp. 176.943.984.518, dimana sebelum dilakukan pembagian provinsi sumatera selatan melakukan biaya pungutan sebesar 5%

dari realisasi penerimaan, setelah dilakukan pembagian biaya pungutan maka didapatkan penerimaan bersih yang akan dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% dari penerimaan bersih, kemudian dari hasil 30% tersebut dibagi menjadi 2 bagian dimana yang 40% dibagi rata sama dengan seluruh daerah Kabupaten/Kota dan yang 60% dibagi berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

PKB Tahun 2005 = Rp. 176.943.984.518

Biaya Pemungutan 5 % = Rp. 176.943.984.518 x 5%

= Rp. 8.847.199.255

Penerimaan Netto = Rp. 176.943.984.518 – Rp. 8.847.199.255

= Rp 168.096.785.263

Pembagian Kabupaten/Kota = 30 % x Rp. 168.096.785.263

= Rp. 50.429.035.579

Bagi Rata Seluruh Kabupaten/Kota sebesar 40%

= 40% x Rp. 50.429.035.579

= Rp. 20.171.614.231

Rp. 20.171.614.231:14 = Rp. 1.440.829.558 yang dibagi sama rata kepada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Provinsi Sumatera selatan

Sedangkan pembagian 60%, dibagi sesuai dengan Potensi daerah yang ada.

= 60% x Rp. 50.429.035.579

= Rp. 30.257.421.347

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2005 berdasarkan potensi daerah yang di lihat dari aspek sebagai berikut :

a) Perhitungan Berdasarkan Luas Wilayah Tahun 2005

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian PKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Luas Wilayah Kabupaten/ Kota tahun 2005. dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase(%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 0,44%, yaitu contoh persentase

Luas Wilayah berbanding total luas wilayah Sumsel Keseluruhan Tahun 2005

$$= \frac{37.403}{8.701.742} x100\%$$

= 0,44%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{0,44}{100} x30.257.421.347$$

= Rp. 133.132.654

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp. 133.132.654 + 1.440.829.588

= Rp. 1.573.962.242

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.4
Pembagian PKB & Berdasarkan Potensi Luas Wilayah Tahun 2005

Kabupaten/ Kota	L.Wilayah (Ha)	%	40% Bagi Rata	60 % Berdasarkan Potensi	Total
Palembang	37.403	0,44	Rp. 1.440.829.588	Rp. 133.132.654	Rp.1.573.962.242
Muba	1.447.700	16.64	Rp. 1.440.829.588	Rp. 5.034.834.912	Rp.6.475.664.500
Banyuasin	1.214.274	14	Rp. 1.440.829.588	Rp. 4.236.038.989	Rp.5.676.868.577
OKI	1.690.532	19.4	Rp. 1.440.829.588	Rp.5.869.939.741	Rp.7.310.769.329
OI	266.609	3.06	Rp. 1.440.829.588	Rp 925.877.093	Rp.2.366.706.681
OKU	291.760	3.35	Rp. 1.440.829.588	Rp.1.013.623.615	Rp.2.454.453.203
Oku Selatan	540.301	6.2	Rp. 1.440.829.588	Rp.1.875.960.123	Rp.3.316.789.711
Oku Timur	335.604	3.85	Rp. 1.440.829.588	Rp.1.164.910.722	Rp.2.605.740.310
Muara Enim	858.794	9.87	Rp. 1.440.829.588	Rp.2.986.407.487	Rp.4.427.237.075
Prabumulih	42.162	0.48	Rp. 1.440.829.588	Rp. 145.235.622	Rp.1.586.065.210
Lahat	663.250	7.6	Rp. 1.440.829.588	Rp.2.299.564.022	Rp.3.740.393.610
Pagaralam	57.916	0.66	Rp. 1.440.829.588	Rp. 199.698.980	Rp.1.441.029.287
Musi Rawas	1.213.457	13.9	Rp. 1.440.829.588	Rp.4.205.781.567	Rp.5.646.611.155
L.Linggau	41.980	0.48	Rp. 1.440.829.588	Rp. 145.235.622	Rp.1.586.062.210
Total	**8.701.742**	**100%**	**Rp. 20.171.614.231**	**Rp. 30.257.421.347**	**Rp.50.429.035.578**

Sumber : Data Olahan, 2007

Berdasarkan perhitungan di atas maka pembagian Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 berdasarkan potensi luas wilayah kabupaten/Kota Sumater Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian adalah Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu Sebesar Rp. 7.310.769.329 dan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kota Palembang yaitu sebesar Rp. 1.573.962.242

b) Perhitungan Berdasarkan Jumlah Penduduk 2005

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian PKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota tahun 2005. Contoh kasus Daerah adalah Kota Palembang, Kota Palembang memiliki penerimaan tertinggi berdasarkan potensi Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan dan Kota Palembang juga paling kecil dalam luas wilayah untuk Jumlah Penduduk Kota Palembang

tahun 2005 sebesar 1.338.793 penduduk dari penduduk Sumsel yang berjumlah 6.755.900 atau 19.82% dari Jumlah Penduduk. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase(%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 19,82%, yaitu contoh persentase

Jumlah Penduduk Kota Palembang berbanding dengan total jumlah penduduk Suamatera Selatan keseluruhan Tahun 2005

$$= \frac{1.338.793}{6.755.900} x100\%$$

= 19,82%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{19,82}{100} x30.257.421.347$$

= Rp. 5.997.020.911

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp.5.997.020.911 + 1.440.829.588

= Rp. 7.437.850.499

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.5
Pembagian PKB Berdasarkan Potensi Jumlah Penduduk Tahun 2005

Kabupaten/ Kota	Jmlh Penduduk	%	40% Bagi Rata	60% Penerimaan	Total
Palembang	1.338.793	19.82	Rp. 1.440.829.588	Rp. 5.997.020.911	Rp. 7.437.850.499
Muba	469.175	6.94	Rp. 1.440.829.588	Rp. 2.099.865.041	Rp. 3.540.694.629
Banyuasin	733.828	1.86	Rp. 1.440.829.588	Rp. 562.788.037	Rp. 2.003.617.625
OKI	656.828	9.72	Rp. 1.440.829.588	Rp. 2.941.021.355	Rp. 4.381.850.943
OI	356.983	5.28	Rp. 1.440.829.588	Rp. 1.597.591.847	Rp. 3.038.421.435
OKU	255.246	3.78	Rp. 1.440.829.588	Rp. 1.143.730.527	Rp. 2.584.560.115
Oku Selatan	317.277	4.7	Rp. 1.440.829.588	Rp. 1.422.098.803	Rp. 2.862.928.391
Oku Timur	556.100	8.23	Rp. 1.440.829.588	Rp. 2.490.185.776	Rp. 3.931.015.364
Muara Enim	632.222	9.36	Rp. 1.440.829.588	Rp. 2.832.094.638	Rp. 4.272.924.226
Prabumulih	130.340	1.93	Rp. 1.440.829.588	Rp. 583.968.232	Rp. 2.024.797.820
Lahat	545.754	8.08	Rp. 1.440.829.588	Rp. 2.444.799.645	Rp. 3.885.629.233
Pagaralam	114.562	1.7	Rp. 1.440.829.588	Rp. 514.376.163	Rp. 1.955.205.751
Musi Rawas	474.430	7.02	Rp. 1.440.829.588	Rp. 2.124.070.978	Rp. 3.564.900.566
L. Linggau	174.452	2.58	Rp. 1.440.829.588	Rp. 780.641.471	Rp. 2.221.471.059
Total	**6.755.900**	**100%**	**Rp. 20.171.614.231**	**Rp. 30.257.421.347**	**50.429.035.578**

Sumber :Data Olahan, 2007

Sedangkan pembagian Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 berdasarkan potensi Jumlah Penduduk kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian adalah Palembang yaitu Sebesar Rp.7.437.850.499 dan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kota Pagar Alam yaitu sebesar Rp. 1.955.205.751.

c) Perhitungan PKB Berdasarkan Jumlah Kendaraan Tahun 2005

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian PKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah berdasarkan aspek Jumlah Kendaraan Kabupaten/ Kota tahun 2005. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase(%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 48,74%, yaitu contoh persentase

Jumlah Kendaraan berbanding total keseluruhan jumlah kendaraan di Sumsel Keseluruhan Tahun 2005

$$= \frac{300.401}{616.400} x100\%$$

= 48,74%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{48,74}{100} x30.257.421.347$$

= Rp. 14.747.467.164

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp.14.747.467.164 + 1.440.829.588

= Rp. 16.188.296.752

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.6
Pembagian PKB Berdasarkan Potensi Jumlah Kendaraan Tahun 2005

Kabupaten/ Kota	Jmlh Kendaraan	%	40% Bagi Rata	60% Penerimaan	Total
Palembang	300.401	48.74	Rp. 1.440.829.588	Rp. 14.747.467.164	Rp. 16.188.296.752
Muba	42.980	9.97	Rp. 1.440.829.588	Rp. 3.016.664.908	Rp. 4.457.494.496
Banyuasin	15.004	2.43	Rp. 1.440.829.588	Rp. 735.255.338	Rp. 2.176.084.926
OKI	35.603	5.78	Rp. 1.440.829.588	Rp. 1.748.878.953	Rp. 3.189.708.541
OI	3.258	0.53	Rp. 1.440.829.588	Rp. 160.364.333	Rp. 1.601.193.921
OKU	51.852	8.41	Rp. 1.440.829.588	Rp. 2.544.649.135	Rp. 3.985.478.723
Oku Selatan	1.606	0.26	Rp. 1.440.829.588	Rp. 78.669.296	Rp. 1.519.498.884
Oku Timur	5.751	0.93	Rp. 1.440.829.588	Rp. 281.394.018	Rp. 1.722.223.606
Muara Enim	60.927	9.89	Rp. 1.440.829.588	Rp. 2.992.458.971	Rp. 4.433.288.559
Prabumulih	17.017	2.76	Rp. 1.440.829.588	Rp. 835.104.829	Rp. 2.275.934.417
Lahat	22.171	3.6	Rp. 1.440.829.588	Rp. 1.089.267.168	Rp. 2.530.096.756
Pagaralam	3.385	0.55	Rp. 1.440.829.588	Rp. 166.415.817	Rp. 1.607.245.405
Musi Rawas	38.287	6.21	Rp. 1.440.829.588	Rp. 1.878.985.865	Rp. 3.319.815.453
Linggau	17.798	2.89	Rp. 1.440.829.588	Rp. 874.439.477	Rp. 2.315.269.065
Total	**616.400**	**100%**	**Rp. 20.171.614.231**	**Rp. 30.257.421.347**	**Rp.50.429.035.578**

Sumber : Data Olahan, 2007

Sedangkan untuk Jumlah kendaraan tertinggi pembagian Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 berdasarkan potensi Jumlah kendaraan kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian tahun 2005 adalah Palembang yaitu Sebesar Rp.16.188.296.752 dan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.519.498.884 adalah daerah Kabupaten OKU Selatan (OKUS).

Berikut ini penulis akan menguraikan rekapitulasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2005 berdasarkan potensi daerah.

Tabel IV.7
Rekapitulasi Pembagian PKB Tahun 2005

Kabupaten Kota	Luas Wilayah	Jml. Penduduk	Jml. Kendaraan	Total
Palembang	Rp.1.573.962.242	Rp. 7.437.850.499	Rp. 16.188.296.752	Rp. 25.200.109.493
Muba	Rp.6.475.664.500	Rp. 3.540.694.629	Rp. 4.457.494.496	Rp. 14.473.853.625
Banyuasin	Rp.5.676.868.577	Rp. 2.003.617.625	Rp. 2.176.084.926	Rp. 9.856.571.128
OKI	Rp.7.310.769.329	Rp. 4.381.850.943	Rp. 3.189.708.541	Rp. 14.882.328.813
OI	Rp.2.366.706.681	Rp. 3.038.421.435	Rp. 1.601.193.921	Rp. 7.006.322.037
OKU	Rp.2.454.453.203	Rp. 2.584.560.115	Rp. 3.985.478.723	Rp. 9.024.492.041
Oku Selatan	Rp.3.316.789.711	Rp. 2.862.928.391	Rp. 1.519.498.884	Rp. 7.699.216.986
Oku Timur	Rp.2.605.740.310	Rp. 3.931.015.364	Rp. 1.722.223.606	Rp. 8.258.979.550
Muara Enim	Rp.4.427.237.075	Rp. 4.272.924.226	Rp. 4.433.288.559	Rp. 13.133.449.860
Prabumulih	Rp.1.586.065.210	Rp. 2.024.797.820	Rp. 2.275.934.417	Rp. 5.886.797.447
Lahat	Rp.3.740.393.610	Rp. 3.885.629.233	Rp. 2.530.096.756	Rp. 10.156.119.599
Pagaralam	Rp.1.441.029.287	Rp. 1.955.205.751	Rp. 1.607.245.405	Rp. 5.003.480.443
Musi Rawas	Rp.5.646.611.155	Rp. 3.564.900.566	Rp. 3.319.815.453	Rp. 12.531.327.174
L. Linggau	Rp.1.586.062.210	Rp. 2.221.471.059	Rp. 2.315.269.065	Rp. 6.122.802.324
Total	**Rp.50.429.035.578**	**50.429.035.578**	**Rp.50.429.035.578**	**Rp.151.287.106.734**

Sumber : Data Olahan, 2007

Berdasarkan perhitungan di atas maka pembagian Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 berdasarkan potensi daerah Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian adalah Palembang sebesar Rp. 25.200.109.493 sedangkan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kota Pagaralam yaitu sebesar Rp. 5.003.480.443

b. Tahun 2006

.Pada tahun 2006 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan pendapatan dari sektor PKB sebesar Rp. 212.471.393.641., dimana sebelum dilakukan pembagian provinsi sumatera selatan melakukan biaya pungutan sebesar 5% dari realisasi penerimaan, setelah dilakukan pembagian biaya pungutan maka didapatkan penerimaan bersih yang akan dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% dari penerimaan bersih, kemudian dari hasil 30% tersebut dibagi menjadi 2 bagian dimana yang 40% dibagi rata sama dengan seluruh daerah Kabupaten/Kota dan yang 60% dibagi berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

PKB 2006 = Rp. 212.471.393.641

Biaya Pemungutan 5 % = Rp. 212.471.393.641 x 5%

= Rp. 10.623.569.682

Penerimaan Netto = Rp. 212.471.393.641. – Rp. 10.623.569.682

= Rp 201.847.823.959

Pembagian Netto = 30 % x Rp. 201.847.823.959

= Rp. 60.554.347.188

Pembagian Rata sama Kepada Seluruh Kabupaten/Kota sebesar 40%

= 40% x Rp. 60.554.347.188

= Rp. 24.221.738.875

kemudian di bagi rata kepada 14 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Rp. 24.221.738.875:14 = Rp. 1.730.124.205 yang dibagi sama rata kepada seluruh Kabupaten/Kota yang ada d seluruh Provinsi Sumatera selatan

Sedangkan pembagian yang 60%, dibagi sesuai dengan Potensi daerah yang ada.

= 60% x Rp. 60.554.347.188

= Rp. 36.332.608.313

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2006 berdasarkan potensi daerah yang di lihat dari aspek sebagai berikut :

a) Perhitungan Berdasarkan Luas Wilayah Tahun 2006

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian PKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Luas Wilayah Kabupaten/ Kota tahun 2006. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase(%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 0,44%, yaitu contoh persentase

Luas Wilayah berbanding total luas wilayah Sumsel Keseluruhan Tahun 2006

$$= \frac{37.403}{8.701.742} x100\%$$

= 0,44%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{0,44}{100} x Rp.36.332.608.313$$

= Rp. 159.863.477

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp. 159.863.477 + 1.730.124.205

= Rp. 1.889.987.682

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.8
Pembagian PKB Berdasarkan Potensi Luas Wilayah Tahun 2006

Kabupaten/ Kota	L. Wilayah (Ha)	%	40 % Bagi Rata	60% Potensi Daerah	Total
Palembang	37.403	0,44	Rp. 1.730.124.205	Rp. 159.863.477	Rp. 1.889.987.682
Muba	1.447.700	16.64	Rp. 1.730.124.205	Rp. 6.045.746.023	Rp 7.775.870.228
Banyuasin	1.214.274	14	Rp. 1.730.124.205	Rp. 5.086.565.164	Rp. 6.816.689.369
OKI	1.690.532	19.4	Rp. 1.730.124.205	Rp. 7.048.526.012	Rp. 8.778.650.217
OI	266.609	3.06	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.111.777.814	Rp. 2.841.902.019
OKU	291.760	3.35	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.217.142.378	Rp. 2.947.266.583
Oku Selatan	540.301	6.2	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.252.621.715	Rp. 3.982.745.920
Oku Timur	335.604	3.85	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.398.805.420	Rp. 3.128.929.625
Muara Enim	858.794	9.87	Rp. 1.730.124.205	Rp. 3.586.028.440	Rp. 5.316.152.645
Prabumulih	42.162	0.48	Rp. 1.730.124.205	Rp. 174.396.520	Rp. 1.904.520.725
Lahat	663.250	7.6	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.761.278.232	Rp. 4.491.402.437
Pagaralam	57.916	0.66	Rp. 1.730.124.205	Rp. 239.795.215	Rp. 1.969.919.420
Musi Rawas	1.213.457	13.9	Rp. 1.730.124.205	Rp. 5.050.232.555	Rp. 6.780.356.760
L. Linggau	41.980	0.48	Rp. 1.730.124.205	Rp. 174.396.520	Rp. 1.904.520.725
Total	**8.701.742**	**100%**	**Rp. 24.221.738.875**	**Rp. 36.332.608.313**	**Rp.60.554.47.188**

Sumber : Data Olahan, 2007

Berdasarkan perhitungan di atas maka pembagian Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2006 berdasarkan potensi luas wilayah kabupaten/Kota Sumater Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian adalah Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu Sebesar Rp. 8.778.650.217 dan daerah yang

terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kota Palembang yaitu sebesar Rp. 1.889.987.682

b) Perhitungan Berdasarkan Jumlah Penduduk 2006

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian PKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota tahun 2006. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase(%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 0,44%, yaitu contoh persentase

Jumlah Penduduk Kota Palembang berbanding dengan total jumlah penduduk Sumsel Keseluruhan Tahun 2006

$$= \frac{1.369.239}{6.899.892} x100\%$$

= 19,84%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{19,84}{100} xRp.36.332.608.313$$

= Rp. 7.206.405.489

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp. 159.863.477 + 1.730.124.205

= Rp. 8.936.529.694

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.9
Pembagian PKB Berdasarkan Potensi Jumlah Penduduk Tahun 2006

Kabupaten/ Kota	Jml. Penduduk	%	40 % Bagi Rata	60% Potensi Daerah	Total
Palembang	1.369.239	19.84	Rp. 1.730.124.205	Rp. 7.206.405.489	Rp. 8.936.529.694
Muba	484.245	7.02	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.549.847.103	Rp. 4.279.971.308
Banyuasin	757.398	10.98	Rp. 1.730.124.205	Rp. 3.988.222.393	Rp. 5.718.346.598
OKI	672.192	9.74	Rp. 1.730.124.205	Rp. 3.538.796.049	Rp. 5.268.920.254
OI	365.333	5.3	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.925.098.240	Rp. 3.655.222.445
OKU	259.292	3.76	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.365.730.073	Rp. 3.095.854.278
Oku Selatan	322.307	4.67	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.696.265.808	Rp. 3.426.390.013
Oku Timur	564.824	8.19	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.974..821.620	Rp. 4.704.945.825
Muara Enim	643.924	9.33	Rp. 1.730.124.205	Rp. 3.388.899.355	Rp. 5.119.023.560
Prabumulih	132.752	1.92	Rp. 1.730.124.205	Rp. 697.394.079	Rp. 2.427.518.284
Lahat	550.478	7.98	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.898.544.143	Rp. 4.628.668.348
Pagaralam	115.553	1.67	Rp. 1.730.124.205	Rp. 606.587.558	Rp. 2.336.711.763
Musi Rawas	484.281	7.02	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.549.847.103	Rp. 4.279.971.308
L. Linggau	178.074	2.58	Rp. 1.730.124.205	Rp. 937.123.294	Rp. 2.667.247.499
Total	**6.899.892**	**100%**	**Rp. 24.221.738.875**	**Rp. 36.332.608.313**	**Rp. 60.554.47.188**

Sumber : Data Olahan, 2007

Sedangkan pembagian Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2006 berdasarkan potensi Jumlah Penduduk kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian adalah Palembang yaitu Sebesar Rp.8.936.529.694 dan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kota Pagar Alam yaitu sebesar Rp. 2.336.711.763.

c) Perhitungan PKB Berdasarkan Jumlah Kendaraan Tahun 2006

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian PKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah berdasarkan aspek Jumlah Kendaraan Kabupaten/ Kota tahun 2006. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase(%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan

memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 44,96%, yaitu contoh persentase

Jumlah Kendaraan Kota Palembang berbanding dengan total jumlah kendaraan di wilayah Sumsel Keseluruhan Tahun 2006

$$= \frac{362.727}{806.905} x100\%$$

= 44,96%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{44,96}{100} xRp.36.332.608.313$$

= Rp. 16.330.644.697

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp. 16.330.644.697 + 1.730.124.205

= Rp. 18.060.768.902

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.10
Pembagian PKB Berdasarkan Potensi Jumlah Kendaraan Tahun 2006

Kabupaten Kota	Jml. Kendaraan	%	40 % Bagi Rata	60% Potensi Daerah	Total
Palembang	362.727	44.96	Rp. 1.730.124.205	Rp. 16.330.644.697	Rp. 18.060.768.902
Muba	57.216	7.09	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.575.272.929	Rp. 4.305.397.134
Banyuasin	25.499	3.16	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.148.110.423	Rp. 2.878.234.628
OKI	48.190	5.97	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.169.056.716	Rp. 3.899.180.921
OI	9.653	1.96	Rp. 1.730.124.205	Rp. 712.119.123	Rp. 2.442.243.328
OKU	64.563	8.01	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.910.241.925	Rp. 4.640.366.130
Oku Selatan	19.000	2.35	Rp. 1.730.124.205	Rp. 853.816.295	Rp. 2.583.930.500
Oku Timur	4.561	0.57	Rp. 1.730.124.205	Rp. 207.095.867	Rp. 1.937.220.072
Muara Enim	79.046	9.8	Rp. 1.730.124.205	Rp. 3.560.595.614	Rp. 5.290.719.819
Prabumulih	24.706	3.06	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.111.777.814	Rp. 2.841.902.019
Lahat	31.552	3.91	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.420.213.985	Rp. 3.150.338.190
Pagaralam	5.324	0.66	Rp. 1.730.124.205	Rp. 239.795.215	Rp. 1.969.919.420
Musi Rawas	49.109	6.08	Rp. 1.730.124.205	Rp. 2.208.414.585	Rp. 3.938.538.790
L. Linggau	25.759	3.19	Rp. 1.730.124.205	Rp. 1.159.019.205	Rp. 2.889.134.410
Total	**806.905**	**100%**	**Rp. 24.221.738.875**	**Rp. 36.332.608.313**	**Rp.60.554.477188**

Sumber : Data Olahan, 2007

Sedangkan untuk aspek potensi daerah berdasarkan jumlah kendaraan pembagian Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2006 berdasarkan potensi Jumlah kendaraan kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian tahun 2006 adalah Palembang yaitu Sebesar Rp.18.060.768.902 dan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.937.220.072 adalah daerah Kabupaten OKU Timur.

Berikut ini penulis akan menguraikan rekapitulasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2006 berdasarkan potensi daerah.

Tabel IV.11
Rekapitulasi Pembagian PKB Tahun 2006

Kabupaten Kota	Luas Wilayah	Jml. Penduduk	Jml. Kendaraan	Total
Palembang	Rp. 1.889.987.682	Rp. 8.936.529.694	Rp. 18.060.768.902	Rp. 28.897.286.278
Muba	Rp. 7.775.870.228	Rp. 4.279.971.308	Rp. 4.305.397.134	Rp. 16.361.238.670
Banyuasin	Rp. 6.816.689.369	Rp. 5.718.346.598	Rp. 2.878.234.628	Rp. 15.413.270.595
OKI	Rp. 8.778.650.217	Rp. 5.268.920.254	Rp. 3.899.180.921	Rp. 17.946.751.392
OI	Rp. 2.841.902.019	Rp. 3.655.222.445	Rp. 2.442.243.328	Rp. 8.939.367.792
OKU	Rp. 2.947.266.583	Rp. 3.095.854.278	Rp. 4.640.366.130	Rp. 10.683.486.991
Oku Selatan	Rp. 3.982.745.920	Rp. 3.426.390.013	Rp. 2.583.930.500	Rp. 9.993.066.433
Oku Timur	Rp. 3.128.929.625	Rp. 4.704.945.825	Rp. 1.937.220.072	Rp. 9.771.095.522
Muara Enim	Rp. 5.316.152.645	Rp. 5.119.023 560	Rp. 5.290.719.819	Rp. 15.725.896.024
Prabumulih	Rp. 1.904.520.725	Rp. 2.427.518.284	Rp. 2.841.902.019	Rp. 7.173.941.028
Lahat	Rp. 4.491.402.437	Rp. 4.628.668.348	Rp. 3.150.338.190	Rp. 12.270.408.975
Pagaralam	Rp. 1.969.919.420	Rp. 2.336.711.763	Rp. 1.969.919.420	Rp. 6.276.550.603
Musi Rawas	Rp. 6.780.356.760	Rp. 4.279.971.308	Rp. 3.938.538.790	Rp. 14.998.866.858
L. Linggau	Rp. 1.904.520.725	Rp. 2.667.247.499	Rp. 2.889.134.410	Rp. 7.460.902.634
Total	**Rp.60.554.477188**	**Rp.60.554.477188**	**Rp.60.554.477188**	**Rp.181.663.431.564**

Sumber : Data Olahan, 2007

Berdasarkan perhitungan di atas maka pembagian Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2006 berdasarkan potensi daerah Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian adalah Palembang sebesar Rp. 28.897.286.278 sedangkan daerah yang terendah menerima pembagian

hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kota Pagaralam yaitu sebesar Rp. 6.276.550.603

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah penulis lakukan, maka penulis akan membandingkan pembagian PKB tahun 2005 dan 2006 yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan perhitungan menurut penulis lakukan yang berdasarkan potensi daerah luas wilayah. jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. Pembagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2005 yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk Kota Palembang sebesar Rp. 21.387.569.621, berdasarkan perhitungan penulis sebesar Rp. 25.200.109.493, sedangkan tahun 2006 yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 24.764.286.605, sedangkan menurut penulis sebesar Rp. 28.887.286.233. Berarti perhitungan yang penulis lakukan lebih besar dari perhitungan yang pemerintah terapkan, sehingga sebaiknya dilakukan sesuai dengan potensi luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang ada sehingga hal ni menjadi cerminan dalam penetapan pembagian hasil PKB.

2 Analisis Pembagian Penerimaan Hasil Pajak BBNKB

a. Tahun 2005

Pada tahun 2005 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan pendapatan dari sektor BBNKB sebesar Rp. 240.824.074.666 , dimana sebelum dilakukan pembagian provinsi sumatera selatar melakukan biaya pungutan sebesar 5% dari realisasi penerimaan, setelah dilakukan pembagian biaya pungutan maka didapatkan penerimaan bersih yang akan dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% dari penerimaan bersih, kemudian dari hasil 30% tersebut dibagi

menjadi 2 bagian dimana yang 40% dibagi rata sama dengan seluruh daerah Kabupaten/Kota dan yang 60% dibagi berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

BBNKB Tahun 2005 = Rp. 240.824.074.666

Biaya Pemungutan 5 % = Rp. 240.824.074.666 x 5%

= Rp. 12.041.203.733

Penerimaan Netto = Rp. 240.824.074.666 – Rp.12.041.203.733

= Rp 228.782.870.933

Pembagian Kabupaten/Kota = 30 % x Rp. 228.782.870.933

= Rp. 68.634.861.280

Bagi Rata Seluruh Kabupaten/Kota sebesar 40%

= 40% x Rp. 68.634.861.280

= Rp. 27.453.944.512

Rp. 27.453.944.512 : 14 = Rp. 1.960.996.036

Sedangkan pembagian yang 60%, dibagi sesuai dengan Potensi daerah yang ada.

= 60% x Rp. 68.634.861.280 = Rp. 41.180.916.768

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian Bea Balik Nama Kendaraab Bermotor (BBNKB) tahun 2005 berdasarkan potensi daerah yang di lihat dari aspek sebagai berikut :

a) Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Luas Wilayah 2005

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian BBNKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Luas Wilayah Kabupaten/ Kota tahun 2005. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan

persentase (%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 0,44%, yaitu contoh persentase

Luas Wilayah berbanding total luas wilayah Sumsel Keseluruhan Tahun 2005

$$= \frac{37.403}{8.701.742} x100\%$$

= 0,44%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{0,44}{100} x41.180.916.768$$

= Rp. 181.196.034

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp. 181.196.034 + 1.960.996.036

= Rp. 2.142.192.070

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.12

Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Luas Wilayah Tahun 2005

Kabupaten/ Kota	L.Wilayah (Ha)	%	40% Bagi Rata	60 % Berdasarkan Potensi	Total
Palembang	37.403	0,44	Rp. 1.960.996.036	Rp. 181.196.034	Rp. 2.142.192.070
Muba	1.447.700	16.64	Rp. 1.960.996.036	Rp. 6.852.504.550	Rp. 8.813.500.586
Banyuasin	1.214.274	14	Rp. 1.960.996.036	Rp. 5.765.328.347	Rp. 7.726.324.383
OKI	1.690.532	19.4	Rp. 1.960.996.036	Rp. 7.989.097.853	Rp. 9.950.093.889
OI	266.609	3.06	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.260.136.053	Rp. 3.221.132.089
OKU	291.760	3.35	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.379.560.712	Rp. 3.340.556.748
Oku Selatan	540.301	6.2	Rp. 1.960.996.036	Rp. 2.553.216.840	Rp. 4.514.212.876
Oku Timur	335.604	3.85	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.585.465.296	Rp. 3.546.461.332
Muara Enim	858.794	9.87	Rp. 1.960.996.036	Rp. 4.065.556.485	Rp. 6.026.552.521
Prabumulih	42.162	0.48	Rp. 1.960.996.036	Rp. 197.668.400	Rp. 2.158.664.436
Lahat	663.250	7.6	Rp. 1.960.996.036	Rp. 3.129.749.674	Rp. 5.090.745.710
Pagaralam	57.916	0.66	Rp. 1.960.996.036	Rp. 271.794.051	Rp. 2.232.790.087
Musi Rawas	1.213.457	13.9	Rp. 1.960.996.036	Rp. 5.724.147.431	Rp. 7.685.143.467
L.Linggau	41.980	0.48	Rp. 1.960.996.036	Rp. 197.668.400	Rp. 2.158.664.436
Total	**8.701.742**	**100%**	**Rp. 27.453.944.512**	**Rp. 41.180.916.768**	**Rp. 68.634.861.280**

Sumber : Data Olahan, 2007

Berdasarkan perhitungan di atas maka pembagian Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2006 berdasarkan potensi luas wilayah kabupaten/Kota Sumater Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian adalah Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu Sebesar Rp. 9.950.093.889 dan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kota Palembang yaitu sebesar Rp. 2.142.192.070

b) Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Jumlah Masyarakat Tahun 2005

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian BBNKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota tahun 2005. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase (%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 19,82%, yaitu contoh persentase

Luas Wilayah berbanding total luas wilayah Sumsel Keseluruhan Tahun 2005

$$= \frac{1.338.793}{6.755.900} x100\%$$

= 19,82%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{19,82}{100} x41.180.916.768$$

= Rp. 8.162.057.703

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp. 8.162.057.703 + 1.960.996.036

= Rp. 10.123.053.739

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.13
Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Jumlah Penduduk Tahun 2005

Kabupaten/ Kota	Jmlh Penduduk	%	40% Bagi Rata	60% Penerimaan	Total
Palembang	1.338.793	19.82	Rp. 1.960.996.036	Rp. 8.162.057.703	Rp. 10.123.053.739
Muba	469.175	6.94	Rp. 1.960.996.036	Rp. 2.857.955.623	Rp. 4.818.951.659
Banyuasin	733.828	1.86	Rp. 1.960.996.036	Rp. 765.965.051	Rp. 2.726.961.087
OKI	656.828	9.72	Rp. 1.960.996.036	Rp. 4.002.785.110	Rp. 5.963.781.146
OI	356.983	5.28	Rp. 1.960.996.036	Rp. 2.174.352.405	Rp. 4.135.348.441
OKU	255.246	3.78	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.556.638.654	Rp. 3.517.634.690
Oku Selatan	317.277	4.7	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.935.503.088	Rp. 3.896.499.124
Oku Timur	556.100	8.23	Rp. 1.960.996.036	Rp. 3.389.189.450	Rp. 5.350.185.486
Muara Enim	632.222	9.36	Rp. 1.960.996.036	Rp. 3.854.533.809	Rp. 5.815.529.845
Prabumulih	130.340	1.93	Rp. 1.960.996.036	Rp. 794.791.693	Rp. 2.755.787.729
Lahat	545.754	8.08	Rp. 1.960.996.036	Rp. 3.327.418.075	Rp. 5.288.414.111
Pagaralam	114.562	1.7	Rp. 1.960.996.036	Rp 700.075.585	Rp. 2.661.071.621
Musi Rawas	474.430	7.02	Rp. 1.960.996.036	Rp. 2.890.900.357	Rp. 4.851.896 393
L. Linggau	174.452	2.58	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.062.467.653	Rp. 3.023.463.689
Total	**6.755.900**	**100%**	**Rp. 27.453.944.512**	**Rp. 41.180.916.768**	**Rp. 68.634.861.280**

Sumber : Data Olahan, 2007

Sedangkan pembagian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 berdasarkan potensi Jumlah Penduduk kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian pada tahun 2005 adalah Palembang yaitu Sebesar Rp.10.123.053.739. sebagai contoh kasus adalah Kota Palembang.

c) Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Jumlah Kendaraan Tahun 2005.

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Jumlah Kendaraan Kabupaten/ Kota tahun 2005. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase (%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 48.74%, yaitu contoh persentase

Jumlah Kendaraan Palembang berbanding dengan total jumlah kendaraan di wilayah Sumsel Keseluruhan Tahun 2005

$$= \frac{300.401}{616.400} x100\%$$

= 48,74%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{48,74}{100} x41.180.916.768$$

= Rp. 20.071.578.833

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp. 20.071.578.833 + 1.960.996.036

= Rp. 22.023.574.869

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.14
Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Jumlah Kendaraan Tahun 2005

Kabupaten/ Kota	Jmlh Kendaraan	%	40% Bagi Rata	60% Pembagian	Total
Palembang	300.401	48.74	Rp. 1.960.996.036	Rp. 20.071.578.833	Rp. 22.032.574.869
Muba	42.980	9.97	Rp. 1.960.996.036	Rp. 4.105.737.402	Rp. 6.066.733.438
Banyuasin	15.004	2.43	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.000.696.277	Rp. 2.961.692.313
OKI	35.603	5.78	Rp. 1.960.996.036	Rp. 2.380.256.989	Rp. 4.341.253.025
OI	3.258	0.53	Rp. 1.960.996.036	Rp. 218.258.859	Rp. 2.179.254.895
OKU	51.852	8.41	Rp. 1.960.996.036	Rp. 3.463.315.100	Rp. 5.424.311.136
Oku Selatan	1.606	0.26	Rp. 1.960.996.036	Rp. 107.070.384	Rp. 2.068.066.420
Oku Timur	5.751	0.93	Rp. 1.960.996.036	Rp. 382.982.526	Rp. 2.343.978.562
Muara Enim	60.927	9.89	Rp. 1.960.996.036	Rp. 4.072.792.668	Rp. 6.033.788.704
Prabumulih	17.017	2.76	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.136.593.303	Rp. 3.097.589.339
Lahat	22.171	3.6	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.482.513.004	Rp. 3.443.509.040
Pagaralam	3.385	0.55	Rp. 1.960.996.036	Rp. 226.495.042	Rp. 2.187.491.078
Musi Rawas	38.287	6.21	Rp. 1.960.996.036	Rp. 2.557.334.931	Rp. 4.518.330.967
L.inggau	17.798	2.89	Rp. 1.960.996.036	Rp. 1.190.128.494	Rp. 3.151.124.530
Total	**616.400**	**100%**	**Rp. 27.453.944.512**	**Rp. 41.180.916.768**	**Rp. 68.634.861.280**

Sumber : Data Olahan, 2007

Daerah yang terendah yang menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 adalah daerah Kota Pagar Alam yaitu sebesar Rp. 2.661.071.621 Sedangkan pembagian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 berdasarkan potensi Jumlah kendaraan kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian pada tahun 2005 adalah Palembang yaitu Sebesar Rp. 22.032.574.869 dan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kabupaten OKU Selatan yaitu sebesar Rp 2.068.066.420.

Berikut ini penulis akan menguraikan rekapitulasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2006 berdasarkan potensi daerah.

Tabel IV.15
Rekapitulasi Pembagian BBNKB Tahun 2005

Kabupaten Kota	Luas Wilayah	Jml. Penduduk	Jml. Kendaraan	Total
Palembang	Rp. 2.142.192.070	Rp. 10.123.053.739	Rp. 22.032.574.869	Rp. 34.297.820.678
Muba	Rp. 8.813.500.586	Rp. 4.818 951.659	Rp. 6.066.733.438	Rp. 19.699.185.683
Banyuasin	Rp. 7.726.324.383	Rp. 2.726 961.087	Rp. 2.961.692.313	Rp 13.414.977.783
OKI	Rp. 9.950.093.889	Rp. 5.963 781.146	Rp. 4.341.253.025	Rp. 15.913.875.035
OI	Rp. 3.221.132.089	Rp. 4.135 348.441	Rp. 2.179.254.895	Rp. 9.535.735.425
OKU	Rp. 3.340.556.748	Rp. 3.517 634.690	Rp. 5.424.311.136	Rp. 12.282.502.574
Oku Selatan	Rp. 4.514.212.876	Rp. 3.896 499.124	Rp. 2.068.066.420	Rp. 10.478.778.420
Oku Timur	Rp. 3.546.461.332	Rp. 5.350 185.486	Rp. 2.343.978.562	Rp. 11.240.625.380
Muara Enim	Rp. 6.026.552.521	Rp. 5.815.529.845	Rp. 6.033.788.704	Rp. 17.875.871.070
Prabumulih	Rp. 2.158.664.436	Rp. 2.755.787.729	Rp. 3.097.589.339	Rp. 8.012.041.504
Lahat	Rp. 5.090.745.710	Rp. 5.288.414.111	Rp. 3.443.509.040	Rp.13.822.668.861
Pagaralam	Rp. 2.232.790.087	Rp. 2.661.071.621	Rp. 2.187.491.078	Rp. 7.081.352.786
Musi Rawas	Rp. 7.685.143.467	Rp. 4.851.896.393	Rp. 4.518.330.967	Rp. 17.055.370.827
L. Linggau	Rp. 2.158.664.436	Rp. 3.023.463.689	Rp. 3.151.124.530	Rp. 8.333.252.655
Total	**Rp. 68.634.861.280**	**Rp. 68.634.861.280**	**Rp. 68.634.861.280**	**Rp. 205.904.583.840**

Sumber : Data Olahan, 2007

Berdasarkan perhitungan di atas maka pembagian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 berdasarkan potensi daerah Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian adalah Palembang sebesar Rp. 34.297.820.678 sedangkan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kota Pagaralam yaitu sebesar Rp. 7.081.352.786

b. Tahun 2006

Pada tahun 2006 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan pendapatan dari sektor BBNKB sebesar Rp. 248.328.249.811., dimana sebelum dilakukan pembagian provinsi sumatera selatan melakukan biaya pungutan sebesar 5% dari realisasi penerimaan, setelah di akukan pembagian biaya pungutan maka didapatkan penerimaan bersih yang akan dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% dari penerimaan bersih kemudian dari hasil 30% tersebut dibagi menjadi 2 bagian dimana yang 40% dibagi rata sama dengan seluruh daerah Kabupaten/Kota dan yang 60% dibagi berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

BBNKB 2006 = Rp. 248.328.249.811. x 5 %

= Rp. 12.416.412.490

Penerimaan Netto = Rp. 248.328.249.811. – Rp. 12.416.412.490

= Rp 235.911.837.321

Pembagian Netto Kabupaten/Kota = 30 % x Rp. 235.911.837.321

= Rp. 70.773.551.196

Pembagian Rata sama Kepada Seluruh Kabupaten/Kota sebesar 40%

= 40% x Rp. 70.773.551.196

= Rp. 28.309.420.478

kemudian di bagi rata kepada 14 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Rp. 28.309.420.478 : 14 = Rp. 2.022.101.462 yang dibagi sama rata kepada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Provinsi Sumatera selatan

Sedangkan pembagian yang 60%, dibagi sesuai dengan Potensi daerah yang ada.

= 60% x Rp. 70.773.551.196

= Rp. 42.464.130.718

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2005 berdasarkan potensi daerah yang di lihat dari aspek sebagai berikut :

a) Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Luas Wilayah 2006

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian BBNKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Luas Wilayah Kabupaten/ Kota tahun 2006. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase (%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 0,44%, yaitu contoh persentase

Luas Wilayah berbanding total luas wilayah Sumsel Keseluruhan Tahun 2005

$$= \frac{37.403}{8.701.742} x100\%$$

= 0,44%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{0,44}{100} x42.464.130.717$$

= Rp. 186.842.175

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp. 186.842.175 + 2.022.101.462

= Rp. 2.208.943.637

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.16
Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Luas Wilayah Tahun 2006

Kabupaten/ Kota	L.Wilayah (Ha)	%	40 % Bagi Rata	60% Potensi Daerah	Total
Palembang	37.403	0,44	Rp. 2.022.101.462	Rp. 186.842.175	Rp. 2.208.943.637
Muba	1.447.700	16.64	Rp. 2.022.101.462	Rp. 7.066.031.351	Rp. 9.088.132.813
Banyuasin	1.214.274	14	Rp. 2.022.101.462	Rp. 5.944.978.300	Rp. 7.967.079.762
OKI	1.690.532	19.4	Rp. 2.022.101.462	Rp. 8.238.041.359	Rp. 10.260.142.821
OI	266.609	3.06	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.299.402.400	Rp. 3.321.503.862
OKU	291.760	3.35	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.422.548.379	Rp. 3.444.649.841
Oku Selatan	540.301	6.2	Rp. 2.022.101.462	Rp. 2.632.776.104	Rp. 4.654.877.566
Oku Timur	335.604	3.85	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.634.869.033	Rp. 3.656.970.495
Muara Enim	858.794	9.87	Rp. 2.022.101.462	Rp. 4.191.209.702	Rp. 6.213.311.164
Prabumulih	42.162	0.48	Rp. 2.022.101.462	Rp. 203.827.827	Rp. 2.225.929.289
Lahat	663.250	7.6	Rp. 2.022.101.462	Rp. 3.225.905.934	Rp. 5.248.007.396
Pagaralam	57.916	0.66	Rp. 2.022.101.462	Rp. 280.263.263	Rp. 2.302.364.725
Musi Rawas	1.213.457	13.9	Rp. 2.022.101.462	Rp. 5.902.514.170	Rp. 7.924.615.632
L. Linggau	41.980	0.48	Rp. 2.022.101.462	Rp. 203.827.827	Rp. 2.225.929.289
Total	**8.701.742**	**100%**	**Rp. 28.309.420.478**	**Rp. 42.464.130.717**	**Rp.70.773.551.196**

Sumber : Data Olahan, 2007

Setelah dilakukan perhitungan, pembagian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 dan 2006 berdasarkan potensi luas wilayah kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian tahun 2005 adalah Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu Sebesar Rp. 9.950.093.889 dan pada tahun 2006 kabupaten Ogan Komering Ilir diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.260.142.821 atau mengalami selisih sebesar Rp. 310.048.932 dan untuk daerah yang terendah dalam penerimaan pembagian hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2005 adalah daerah Kota Palembang yaitu sebesar Rp. 2.142.192.070 sedangkan pada tahun 2006 Kota Palembang mengalami peningkatan dalam penerimaan BBNKB yaitu sebesar Rp. 2.208.943.637 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 66.751.567

b) Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Jumlah Penduduk Tahun 2006

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian BBNKB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota tahun 2006. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase (%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 19,84%, yaitu contoh persentase

Luas Wilayah berbanding total luas wilayah Sumsel Keseluruhan Tahun 2005

$$= \frac{1.369.239}{6.899.892} x100\%$$

= 19,84%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{19,84}{100} x 42.464.130.717$$

= Rp. 8.424.883.534

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp. 8.424.883.534 + 2.022.101.462

= Rp. 10.446.984.996

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.17
Pembagian PKB Berdasarkan Potensi Jumlah Penduduk Tahun 2006

Kabupaten/ Kota	Jml. Penduduk	%	40 % Bagi Rata	60% Potensi Daerah	Total
Palembang	1.369.239	19.84	Rp. 2.022.101.462	Rp. 8.424.883.534	Rp. 10.446.984.996
Muba	484.245	7.02	Rp. 2.022.101.462	Rp. 2.980.981.976	Rp. 5.003.083.438
Banyuasin	757.398	10.98	Rp. 2.022.101.462	Rp. 4.662.561.553	Rp. 6.684.663.015
OKI	672.192	9.74	Rp. 2.022.101.462	Rp. 4.136.006.332	Rp. 6.158.107.794
OI	365.333	5.3	Rp. 2.022.101.462	Rp. 2.250.598.928	Rp. 4.272.700.390
OKU	259.292	3.76	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.596.651.314	Rp. 3.618.752.776
Oku Selatan	322.307	4.67	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.983.074.904	Rp. 4.005.176.366
Oku Timur	564.824	8.19	Rp. 2.022.101.462	Rp. 3.477.812.306	Rp. 5.499.913.767
Muara Enim	643.924	9.33	Rp. 2.022.101.462	Rp. 3.961.903.396	Rp. 5.984.004.857
Prabumulih	132.752	1.92	Rp. 2.022.101.462	Rp 815.311.309	Rp. 2.837.412.771
Lahat	550.478	7.98	Rp. 2.022.101.462	Rp. 3.388.637.631	Rp. 5.410.739.093
Pagaralam	115.553	1.67	Rp. 2.022.101.462	Rp. 709.150.983	Rp. 2.731.252.445
Musi Rawas	484.281	7.02	Rp. 2.022.101.462	Rp. 2.980.981.976	Rp. 5.003.083.438
L. Linggau	178.074	2.58	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.095.574.572	Rp. 3.117.676.034
Total	**6.899.892**	**100%**	**Rp. 28.309.420.478**	**Rp. 42.464.130.717**	**Rp.70.773.551.196**

Sumber : Data Olahan, 2007

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan maka pembagian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2006 berdasarkan potensi Jumlah Penduduk kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi

menerima pembagian pada tahun 2006 adalah Palembang yaitu sebesar Rp. 10.446.984.996 dan daerah terendah yang menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun Rp. 2.731.252.445

c) Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Jumlah Kendaraan Tahun 2006.

Berikut ini penulis akan melakukan perhitungan Pembagian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Potensi Daerah yaitu Jumlah Kendaraan Kabupaten/ Kota tahun 2006. Dimana terlebih dahulu akan ditentukan persentase (%) pembagian, dalam hal ini penulis hanya akan memberikan persentase (%) pembagian untuk Kota Palembang sebesar 44,96%, yaitu contoh persentase

Jumlah kendaraan Palembang berbanding dengan total jumlah kendaraan di wilayah Sumsel Keseluruhan Tahun 2006.

$$= \frac{362.727}{806.905} x100\%$$

= 44,96%.

Kemudian untuk mendapatkan hasil berdasarkan pembagian 60% berdasarkan potensi, maka :

$$= \frac{44,96}{100} x42.464.130.717$$

= Rp. 19.091.873.170

Total Potensi Ditambah Bagi Rata Rp.19.091.873.170 + 2.022.101.462

= Rp. 21.113.974.632

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain sama dengan cara perhitungannya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.18
Pembagian BBNKB Berdasarkan Potensi Jumlah Kendaraan Tahun 2006

Kabupaten Kota	Jml. Kendaraan	%	40 % Bagi Rata	60% Potensi Daerah	Total
Palembang	362.727	44.96	Rp. 2.022.101.462	Rp. 19.091.873.170	Rp. 21.113.974.632
Muba	57.216	7.09	Rp. 2.022.101.462	Rp. 3.010.706.868	Rp. 5.032.808.330
Banyuasin	25.499	3.16	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.341.866.530	Rp. 3.363.967.992
OKI	48.190	5.97	Rp. 2.022.101.462	Rp. 2.535.108.603	Rp. 4.557.210.065
OI	9.653	1.96	Rp. 2.022.101.462	Rp. 832.296.962	Rp. 2.854.398.424
OKU	64.563	8.01	Rp. 2.022.101.462	Rp. 3.401.376.870	Rp. 5.423.478.332
Oku Selatan	19.000	2.35	Rp. 2.022.101.462	Rp. 997.907.072	Rp. 3.020.008.534
Oku Timur	4.561	0.57	Rp. 2.022.101.462	Rp. 242.045.545	Rp. 2.264.147.007
Muara Enim	79.046	9.8	Rp. 2.022.101.462	Rp. 4.161.484.810	Rp. 6.183.586.272
Prabumulih	24.706	3.06	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.299.402.400	Rp. 3.321.503.862
Lahat	31.552	3.91	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.660.347.511	Rp. 3.682.448.973
Pagaralam	5.324	0.66	Rp. 2.022.101.462	Rp. 280.263.263	Rp. 2.302.364.724
Musi Rawas	49.109	6.08	Rp. 2.022.101.462	Rp. 2.581.819.147	Rp. 4.603.920.609
L. Linggau	25.759	3.19	Rp. 2.022.101.462	Rp. 1.354.605.770	Rp. 3.376.707.232
Total	**806.905**	**100%**	**Rp. 28.309.420.478**	**Rp. 42.464.130.717**	**Rp.70.773.551.196**

Sumber : Data Olahan, 2006

Daerah yang tertinggi menerima pembagian pada tahun 2006 Kota Palembang mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.113.974.632 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 939.600.237 daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kabupaten OKU Selatan yaitu sebesar Rp 2.068.066.420. dan untuk tahun 2006 daerah yang menerima pembagian BBNKB yaitu daerah OKU Timur dengan pembagian sebesar Rp. 2.264.147.007dimana tahun sebelumnya OKU Timur menerima pembagian sebesar Rp. 2.343.978.562 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 79.831.555.

Berikut ini penulis akan menguraikan rekapitulasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2006 berdasarkan potensi daerah.

Tabel IV.19
Rekapitulasi Pembagian BBNKB Tahun 2006

Kabupaten Kota	Luas Wilayah	Jml. Penduduk	Jml. Kendaraan	Total
Palembang	Rp. 2.208.943.637	Rp. 10.446.984.996	Rp. 21.113.974.632	Rp. 33.769.903.265
Muba	Rp. 9.088.132.813	Rp. 5.003.083.438	Rp. 5.032.808.330	Rp. 19.124.024.581
Banyuasin	Rp. 7.967.079.762	Rp. 6.684 663.015	Rp. 3.363.967.992	Rp. 18.015.710.769
OKI	Rp. 10.260.142.821	Rp. 6.158.107.794	Rp. 4.557.210.065	Rp. 20.975.460.680
OI	Rp. 3.321.503.862	Rp. 4.272.700.390	Rp. 2.854.398.424	Rp. 10.448.602.676
OKU	Rp. 3.444.649.841	Rp. 3.618.752.776	Rp. 5.423.478.332	Rp. 12.486.880.949
Oku Selatan	Rp. 4.654.877.566	Rp. 4.005.176.366	Rp. 3.020.008.534	Rp. 11.680.062.466
Oku Timur	Rp. 3.656.970.495	Rp. 5.499.913.767	Rp. 2.264.147.007	Rp. 11.421.031.269
Muara Enim	Rp. 6.213.311.164	Rp. 5.984.004.857	Rp. 6.183.586.272	Rp. 18.380.902.293
Prabumulih	Rp. 2.225.929.289	Rp. 2.837.412.771	Rp. 3.321.503.862	Rp. 8.384.846.222
Lahat	Rp. 5.248.007.396	Rp. 5.410.739.093	Rp. 3.682.448.973	Rp. 14.341.195.462
Pagaralam	Rp. 2.302.364.725	Rp. 2.731.252.445	Rp. 2.302.364.724	Rp. 9.335.981.894
Musi Rawas	Rp. 7.924.615.632	Rp. 5.003.083.438	Rp. 4.603.920.609	Rp. 17.531.619.679
L. Linggau	Rp. 2.225.929.289	Rp. 3.117.676.034	Rp. 3.376.707.232	Rp. 8.720.312.555
Total	**Rp.70.773.551.196**	**Rp.70.773.551.196**	**Rp.70.773.551.196**	**Rp. 212.320.653.588**

Sumber : Data Olahan, 2007

Berdasarkan perhitungan di atas maka pembagian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2006 berdasarkan potensi daerah Sumatera Selatan. Daerah yang tertinggi menerima pembagian adalah Palembang sebesar Rp. 33.769.903.265 sedangkan daerah yang terendah menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah Kota Pagaralam yaitu sebesar Rp. 9.335.981.894.

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah penulis lakukan, maka penulis akan membandingkan pembagian BBNKB tahun 2005 dan 2006 yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan perhitungan menurut penulis lakukan yang berdasarkan potensi daerah luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. Bea Balik Nama Kendaraan tahun 2005, menurut Pemerintah sebesar Rp. 23.207.379.682,sedangkan menurut penulis sebesar Rp. 34.297.820.678. pada tahun 2006 menurut pemerintah

sebesar Rp. 21.594.776.110 sedangkan menurut penulis sebesar Rp. 33.769.903.265. berarti perhitungan yang penulis lakukan lebih besar dari perhitungan yang pemerintah terapkan, sehingga sebaiknya dilakukan sesuai dengan potensi luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang ada sehingga hal ni menjadi cerminan dalam penetapan pembagian hasil BBNKB.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir dari skripsi ini maka penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah penulis lakukan, dan kemudian akan diberikan saran-saran atas permasalahan yang penulis temukan.

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan pada Bab IV maka penulis mencoba menyimpulkan hasil analisis yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2005 berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan total pembagian ke seluruh kabupaten/kota sebesar Rp 50.743.760.692 berdasarkan perhitungan penulis pembagian ke seluruh kabupaten/kota sebesar Rp 151.287.106.734 sedangkan PKB tahun 2006 berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah total pembagian ke seluruh kabupaten/kota sebesar Rp 60.856.459.998 berdasarkan perhitungan penulis pembagian ke seluruh kabupaten/kota sebesar Rp 181.663.431.564

Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2005 berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan total pembagian ke seluruh kabupaten/kota sebesar Rp 68.705.282.395 berdasarkan perhitungan penulis pembagian ke seluruh kabupaten/kota sebesar Rp 205.904.583.840 sedangkan BBNKB tahun 2006 berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah total pembagian ke seluruh kabupaten/kota sebesar

Rp 69.391.395.223 berdasarkan perhitungan penulis pembagian ke seluruh kabupaten/kota sebesar Rp 212.320.653.588

B. Saran

Dalam pembagian hasil PKB dan BBNKB hendaknya pemerintah dapat memproporsikan antara daerah yang potensial dengan kesetaraan antar daerah, hendaknya pemerintah dapat mengkaji lagi konsep pembagiannya, karena ada kota yang memperoleh pembagian terbesar dan ada daerah yang sangat kecil dalam menerima pembagian.

KEPUSTAKAAN

Ismail Munawar, 2004. **Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah. Lintas Ekonomi** Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang Penerbit Harvindo, Jakarta.

Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,** Edisi Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Marihot.P. Siahaan. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mudrajad Kuncoro. 2003.**Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi,** Aksara Pratama, Yogyakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metodelogi Penelitian Ekonomi Manajemen dan Akuntansi,** Penerbit Liberty, Yogyakarta.

W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian,** Edisi I, Penerbit YKPN, Yogyakarta.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Sugiono. 2004. **Metode Penelitian Bisnis.** Cetakan kelima, penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan. UU. Nomor 212 Tahun 2002 Tentang **Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air.**

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang **Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan**

Wahyudi, Dadang. 2005. **Peranan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN	IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
JURUSAN MANAJEMEN (S1)	No 3450/D/T/2005	No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)	No 3449/D/T/2005	No 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 (B)
MANAJEMEN PEMASARAN (D III)	No 1611/D/T/2005	No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal	:	Kamis, 28 Februari 2008
Waktu	:	13.00 WIB
Nama	:	**ROLLIES ANTONI**
NIM	:	22 2002 201
Jurusan	:	Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	:	Akuntansi Pemerintahan
Judul Skripsi	:	**ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN POTENSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL. PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Orba Kurniawan, SE. SH	Pembimbing		
2.	Hj. Yuhanis Ladewi, SE. M.Si	Ketua Penguji	15-04-08	
3.	M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA	Anggota Penguji I	11-3-2008	
4.	M. Orba Kurniawan, SE. SH	Anggota Penguji II		

Palembang, Maret 2008
An. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, SE. M.Si

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	Rollies Antoni	PEMBIMBING	
N I M/NIRM	222002201	KETUA	M.Orba Kurniawan, SE.SH
PROGRAM STUDI	MANAJEMEN/AKUNTANSI	ANGGOTA	
JUDUL SKRIPSI	Analisis Bagi Hasil Pajak Kenderaan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Berdasarkan Potensi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selata.		

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING KETUA	PARAF PEMBIMBING ANGGOTA	KETERANGAN
1	19/1 08	Bab I + II & III			Acc + perbaiki
2	~~6/2 08~~				
3	26/1 08	Bab I + II & III			Acc
4	1/2 08	Bab IV			perbaiki
5	4/2 08	Bab IV			perbaiki
6	8/2 08	Bab IV			perbaiki
7	12/2 08	Bab IV			perbaiki
8	14/2 08	Bab IV			perbaiki
9	15/2 -08	Bab IV & V			Cyst Bab V
10					perbaiki
11	18/2 -08	Bab IV			Acc
12	18/2 -08	Bab V			perbaiki
13	18/2 -08	Bab V			Acc Sup
14					di cetak
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa dibenarkan [illegible] Skripsi [illegible] terhitung [illegible]

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal / /

Dekan
Ketua Jurusan,

Drs. Sunardi, SE.MSi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG ★ FAKULTAS EKONOMI ★

KARTU AKTIVITAS
BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

NAMA MAHASISWA	: ROLLIES ANTONI	PEMBIMBING	
NIM	: 22 2002 201	KETUA	: M. ORBA KURNIAWAN, SE. SH
JURUSAN	: AKUNTANSI	ANGGOTA	:

JUDUL USULAN PENELITIAN : **ANALISIS PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARAN POTENSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	7/11 - 2007	pra Up			
2					pulsmi
3	1-/11 - 2007	pra Up +			
4		Lanjut Up			Aee
5	17/11 - 2007	Up			
6					pulsmi
7	3/12 - 2007	Up			
8					pulsmi
9	5/12 - 2007	Up			
10					Aee

Tanggal Seminar yang disepakati :

Di keluarkan : Palembang
Pada Tgl

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Drs. Sunardi, SE. M.Si

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
Yang dibawa oleh Pemakalah

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
1.	DENI AFFANDI	22 2002 177	
2	INSAN SETIAWAN	22 2002 176	
3	Muhammad Dali	22. 2003-086	
4.	M. Zulvan Varianda	22. 2003.212	
5.	Etriliza	22 2002 178	
6.	Lina Maryati	22 2002 226	
7.	Lina Martia Sari	22 2003 196	
8	Godav. Sriwijaya	22. 2002. 122	
9	BUDI SETIAWAN	22. 2002. 200	
10	M. Ismail	22. 2002. 083	

CATATAN :

- Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN POM IX KAMPUS TELEPON 310633
PALEMBANG

Palembang, 21 Mei 2007

Nomor : 423.4/000409/Penda
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bantuan Data

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Plg.
Jln. Jend A.Yani 13 Ulu
di
Palembang

Memenuhi Surat Saudara Nomor : 884/G-17/FE-UMP/IV/2007 tanggal 3 Mei 2007 perihal Mohon Bantuan Data, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak berkeberatan untuk memberikan data/keterangan kepada Mahasiswa yang bernama **Rollies Antoni** Nim 22 2002 201 tersebut sepanjang untuk bahan kajian ilmiah dan tidak untuk disebarluaskan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

22 s.d. 28 mei-2007

WAKIL KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

FARKWAN SOBRIE, SE. MM
PEMBINA TK I NIP. 010221435

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN POM IX KAMPUS TELEPON 310633
PALEMBANG

Palembang, 15 Februari 2008

Nomor : 423.4 / 000134 / Penda.
Lampiran : -
Perihal : **Bantuan Data**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
di
Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 884/G-17/FE-UMP/V/2007 tanggal 03 Mei 2007 perihal Mohon Bantuan Data, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa yang bernama **Rollies Antoni Nim. 22 2002 201 Jurusan Akuntansi,** memang benar telah mengambil data-data pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk keperluan penyusunan Skripsi dari tanggal 22 April s.d. 30 April 2007.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WAKIL KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

H. MARWAN SOBRIE, SE. MM
PEMBINA TINGKAT I. NIP. 010221435

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 061 /J-10/FE-UMP/I /2008

بسم الله الرحمن الرحيم

Diberikan Kepada :

Nama : ROLLIES ANTONI

NIM : 22 2002 201

Jurusan : **Akuntansi**

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 29 Zulhijjah 1428 H
08 Januari 2008 M.

A.n. Dekan
Pembantu Dekan IV,

M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama	: Rollies Antoni
NIM	: 22 2002 201
Tempat / Tanggal Lahir	: Epil, 2 Agustus 1983
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Alamat	: Jln.A. yani Lr. A kadir Rt. 20A No. 582 Palju Palembang
Nomor Telpon / HP	: (0711) 7831623
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nama Orang Tua	:
1. Ayah	: M. Isa Ansori
2. Ibu	: Herlina
Pekerjaan Orang Tua	:
1. Ayah	: Karyawan BRI
2. Ibu	: Ibu Rumah Tangga

Palembang, Februari 2008
Penulis

(Rollies Antoni)